

- Nanang Mizwar Hasyim S.Sos, M.Si -

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA



**KOMUNIKASI EFEKTIF
DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DESA**

www.samudrabiru.co.id

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si.

www.samudrabiru.co.id



**Komunikasi Efektif
dalam Mewujudkan Kemandirian Desa**

© Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si.

x + 118 halaman; 14 x 20 cm.

ISBN: 978-623-261-306-5

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2021

Penulis : Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si.

Editor : Alviana

Sampul : Hasan As'ad

Layout : Chair

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “*Komunikasi Efektif dalam Mewujudkan Kemandirian Desa*” ini telah terselesaikan. Buku panduan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam usaha pembangunan kemandirian desa. Selain itu, hadirnya buku ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan komunikasi yang berhubungan dengan usaha pembangunan desa. Sehingga bisa menjadi referensi para pegiat pembangunan desa, khususnya para birokrat maupun perangkat desa.

Saya sampaikan terima kasih kepada LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendukung penyelesaian buku ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi selaku Kepala Desa Panggungharjo dan segenap perangkat desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudari Yusniar dan Yeni yang selalu setia mendampingi sampai akhir dalam pencarian dan pengumpulan data di lapangan sehingga proses pembuatan buku ini menjadi lancar.

Tak lupa juga saya ucapkan kepada rekan-rekan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat kepada saya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara Mohamad Hasan Asadi yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membantu penyelesaian buku ini. Pastinya saya ucapkan juga terima kasih tak terhingga buat istri tercinta, Eva Dwi Arimastuti dan ananda Elania Maheswari Hasyim yang selalu setia mendampingi dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan buku ini.

Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pegiat pembangunan desa, khususnya para perangkat desa dan umumnya semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan.

Yogyakarta 21 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Praktis	8
2. Teoretis	8
E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	9
1. Tinjauan Pustaka	9
2. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Unit Analisis	21
3. Sumber Data	21
4. Informan	22
5. Informan	23

6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Teknik Analisis Data	25

BAB II

DESA PANGGUNG HARJO SEBAGAI DESA MANDIRI 27

A. Profil Desa Panggungharjo	27
1. Sejarah	27
2. Wilayah	30
3. Pembagian Wilayah	32
4. Kependudukan	33
B. Kelembagaan Desa Panggungharjo	40
1. Visi	40
2. Misi	41

www.samudrabiru.co.id

BAB III

PERENCANAAN KOMUNIKASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA 45

A. Tujuan Komunikasi	47
1. Analisis Permasalahan	47
2. Penentuan Tujuan dan Sasaran Komunikasi	53
B. Khalayak dan Pendekatan Komunikasi	59
1. Program Pembangunan Fisik	60
2. Program Pembangunan Nonfisik	64

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA 81

A. Pesan Komunikasi	82
1. Komunikasi Langsung	83
2. Komunikasi Tidak Langsung	87
3. Media Komunikasi	91
BAB V	
KOMUNIKASI EFEKTIF PERANGKAT DESA PANGGUNG HARJO	95
A. Tujuan Komunikasi	95
1. Analisis Permasalahan	95
2. Penentuan Tujuan dan Sasaran Komunikasi	97
3. Penentuan Khalayak dan Pendekatan Komunikasi yang Digunakan	99
4. Pesan Komunikasi	101
5. Media Komunikasi	102
BAB VI	
PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Implikasi Hasil Penelitian	112
DAFTAR PUSTAKA	115

www.samudrabiru.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara kedesa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintah memberikan perhatian dengan membuat regulasi berupa UU No.6/2014

tentang desa dengan misi yaitu, negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Pada tahun 2014 program kerja pemerintah yang bisa diapresiasi dalam upaya pembangunan desa adalah mengadakan perlombaan desa dan kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat. Adapun indikator penilaiannya adalah pada upaya desa tersebut mengelola fasilitas, sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada masyarakat desa.²

Dalam hal ini penghargaan desa terbaik nomor satu di berikan kepada desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Panggungharjo merupakan desa yang memiliki potensi bagus dalam upaya pengembangan selama dua tahun terakhir, yakni sejak awal 2012 hingga akhir 2013. Dan dalam perkembangannya sampai sekarang Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa berdaya dan mandiri yang menjadi referensi desa lainya dalam upaya proses pembangunan

¹ Drs. Sutoro Eko Yunanto , makalah berjudul "*regulasi baru desa*", dipublikasikan pada Bimbingan Teknis DPRD Jombang di Balai Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional DIY, tanggal 17 Februari 2014.

² www.Kendagri.go.id. *Mendagri Anugrahi Penghargaan Desa/Kelurahan Terbaik 2014*, pada tanggal 18 Agustus 2014, diupload pada tanggal 19 November 2015.

desa. Kemandirian yang dimiliki di buktikan dengan data penghasilan APBDes (anggaran pendapatan belanja desa) yang pada setiap tahunnya hampir memperoleh 3 sampai 4 milyar dan menurut data terakhir tahun 2015 uang kas yang dimiliki oleh Desa Panggungharjo sekitar 45 milyar.³

Kemandirian desa merupakan sebuah harapan yang selalu membutuhkan kreatifitas, komitmen tinggi dan konsistensi besar dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah direncanakan secara strategis dan terukur. Sejak tahun 2012 desa Panggungharjo sudah merencanakan program-program pembangunan desa dengan melandaskan pada pemberdayaan potensi dan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Adapun program-program yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo dalam rangka pembangunan desa adalah dengan menitik beratkan pada delapan program pemberdayaan desa diantaranya adalah program pemberdayaan dibidang ekonomi, program pemberdayaan di bidang kesehatan, program pemberdayaan dibidang pendidikan, program pemberdayaan di bidang PKK, program pemberdayaan dibidang kelembagaan, program pemberdayaan di bidang pemerintahan, program pemberdayaan di bidang keamanan dan ketertiban, dan program pemberdayaan di bidang partisipasi masyarakat.⁴

³ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Kepala Desa Panggungharjo, di Pondok AMUMARTA Jejeran Bantul Yogyakarta, Kamis, 20 November 2016, Jam 21.00.

⁴ Panggungharjo-bantul.desa.id. *profil dan program kerja desa panggungharjo 2012 s/d 2013*. Di upload pada tanggal 18 November 2015.

Dalam perkembangannya, program-program pembangunan desa yang sudah dilakukan dengan menitik beratkan pada delapan pemberdayaan tersebut melahirkan banyak inovasi-inovasi strategis yang mempunyai dampak positif bagi kehidupan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Panggungharjo berupa pelayanan dalam bentuk Program KUPAS untuk pendayagunaan potensi lokal dalam bentuk BUM desa, dan pelayanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dalam bentuk program Bapel JPS.

Inovasi program KUPAS merupakan terobosan yang dibuat dalam pengembangan usaha sektor usaha rumah tangga yang dikelola oleh pemerintah desa dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing warga. Selain untuk kemajuan di sektor ekonomi warga, hasil dari program ini juga merupakan subsidi bagi program pelayanan lainnya, salah satunya adalah program Bapel JPS. Adapun konsentrasi dari program Bapel JPS adalah memberikan pelayanan gratis bagi kelompok rentan berupa pembiayaan kesehatan bagi umum dalam bentuk kartu sehat, pelayanan pendidikan dalam bentuk kartu pintar dan pelayanan kesehatan Ibu dan anak dalam bentuk kartu KIA.

Seperti yang diuraikan di atas, apa yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo merupakan bukti riil yang bisa

menjadi referensi dalam upaya pembangunan desa yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa. Tentunya apa yang sudah dilakukan merupakan sebuah bentuk kerja keras, kreatif dan inovatif dengan perencanaan strategis yang diciptakan melalui proses analisis dan evaluatif dari banyak sudut pandang salah satunya adalah melalui sudut pandang komunikasi. Dalam konteks upaya pembangunan desa sentuhan komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilannya. Dimana komunikasi bagi pembangunan adalah sebuah desain dan penggunaan yang sistematis dari aktivitas partisipatif, pendekatan komunikasi, metode dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan diantara para-pihak (stakeholders) dalam sebuah proses pembangunan guna memastikan saling pengertian dan konsensus yang menuju kepada tindakan.⁵

Dalam perspektif ini, partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi maupun tindakan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶ Sedangkan pembangunan

⁵ Anyaegbunam, Chike.dkk. *Participatory Rural Communication Appraisal Starting with The People*. Rome: SADC Centre of Communication for Development, 2004. hal. 14

⁶ Adams (1995) dalam Jumrana, *Model-Model Desain Komunikasi Pembangunan*, Jurnal Arca Diurna Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Haluoleo, vol.08 no. 02, 2012. hal. 28-34

masyarakat adalah suatu gagasan perubahan dari bawah. Gagasan ini menghargai pengetahuan, keterampilan, kebudayaan sumber daya, dan proses-proses lokal sebagai sesuatu yang penting. Pendekatan dari bawah dan partisipasi merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan masyarakat. Formulasi keduanya menempatkan komunikasi pada posisi sentral untuk menggerakkan proses-proses yang berlangsung. Adapun Peran komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan, diantaranya adalah (a) Pemberdayaan masyarakat (b) Pemahaman bersama dan kesepakatan untuk berbuat (c) Melatih kelompok interest di masyarakat (d) Menciptakan kebijakan yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas dan juga pertimbangan atas pentingnya peranan desa bagi kelanjutan kehidupan bangsa. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi efektif yang telah dilakukan oleh Pamong Desa Panggunharjo, mengingat dalam kasus ini desa Panggunharjo merupakan Desa yang sudah berhasil dalam pembangunannya menjadi desa mandiri. Selain itu juga diharapkan dari penelitian ini bisa menghadirkan pemahaman baru tentang bagaimana upaya dalam membangun desa menuju desa yang mandiri dengan pendekatan proses komunikasi sehingga diharapkan bisa menjadi referensi baru atas inovasi pembangunan bagi desa-desa lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses komunikasi efektif yang telah dilakukan oleh aparatur Desa Panggungharjo. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana komunikasi efektif yang telah dilakukan dalam penelitian ini akan diuraikan dulu bagaimana perencanaan komunikasi yang dibuat oleh aparatur Desa berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, kemudian menjelaskan pula bagaimana strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh aparatur Desa hingga pada seperti apa model strategi komunikasi yang telah dipakai. Setelah itu hal yang tidak kalah penting adalah mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan perencanaan dan strategi komunikasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh aparat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian Desa.
2. Mendeskripsikan dan memberi gambaran seperti apa strategi dan model strategi komunikasi yang sudah dilakukan oleh aparat Desa Panggungharjo dalam Upaya mewujudkan desa mandiri.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan perencanaan dan strategi komunikasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan, manfaat, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana proses komunikasi efektif yang dilakukan oleh aparatur Desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan dan landasan bagi pemerintahan desa lainnya, dan serta masyarakat luas yang secara tidak sadar maupun sadar merupakan bagian dari penentu kemajuan Desa.

2. Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu komunikasi khususnya disiplin keilmuan komunikasi pembangunan, memperkaya penjabaran teori-teori komunikasi yang bersinggungan dengan perencanaan dan strategi komunikasi pembangunan yang kemudian memberikan sumbangan dalam pengaplikasian secara praktis yang menjadi landasan dalam pembelajaran ilmu Komunikasi.

E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul “*strategi komunikasi partisipatif pada awal program pembangunan (Studi Kasus Pendekatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Kepada Masyarakat dalam Program Pembangunan Underpass di Makamhaji)*” yang dilakukan oleh Annis Azhar Suryaningtyas” telah membahas dengan pendekatan deskriptif kualitatif tentang strategi komunikasi pada awal pembangun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi pembangunan partisipatif sebagai upaya pendekatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada warga Makamhaji dalam pembangunan *underpass* melalui program sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan mengikutsertakan warga dalam kegiatan simbolik pembangunan. Komunikasi pembangunan partisipatif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan lancar dan seperti bagaimana mestinya. Meskipun demikian, masih ada sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya seperti menuliskan nama file untuk judul maket *underpass* saat sosialisasi.⁷

Sungguhpun demikian, walaupun obyek penelitian sama-sama menitikberatkan pada strategi komunikasi yang telah dilakukan dalam upaya pembangunan. Perbedaan dengan

⁷ Annis Azhar Suryaningtyas, *Strategi Komunikasi Partisipatif pada Awal Program Pembangunan (Studi Kasus Pendekatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Masyarakat dalam Program Pembangunan Underpass di Makamhaji)*, Program Studi Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian ini adalah pada ruang lingkup obyek penelitian. Dimana yang menjadi sasarannya adalah tidak berkonsentrasi hanya pada sebuah pelaksanaan satu program saja, akan tetapi lebih holistik yaitu kesemua proses perencanaan strategi komunikasi yang menjadi panduan dalam melaksanakan setiap program yang ada dan menjadi pedoman dalam menentukan inovasi-inovasi baru untuk program pembangunan desa Panggunharjo.

Selanjutnya yang menjadi pembanding dalam penelitian ini adalah penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Devina Kristie Sisvianda dengan judul “*strategi komunikasi pendamping PNPM-MPD dalam upaya pemberian pemahaman program kepada masyarakat (Studi pada Kegiatan SPP di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa- Kabupaten Jember)*”⁸. Pada penelitian ini secara umum menghasilkan penerapan mekanisme pelaksanaan PNPM-Mpd di Desa Kemuning Lor sama dengan PNPM-Mpd di daerah lainnya. Namun perbedaannya terletak pada fokus penggunaan strategi komunikasi dan pengelolannya. Strategi komunikasi yang digunakan pendamping PNPM-Mpd dalam memberikan pemahaman program kepada masyarakat di Desa Kemuning Lor melalui pendekatan strategi Desain Instruksional (Sosialisasi & Pelatihan), serta Strategi Partisipatori (kehadiran & keterlibatan masyarakat).

⁸ Devina Kristie Sisvianda, *Strategi Komunikasi Pendamping PNPM-MPD dalam Upaya Pemberian Pemahaman Program kepada Masyarakat (Studi pada Kegiatan SPP di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa- Kabupaten Jember)*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada fokus kajian atau angle penelitian yaitu strategi komunikasi. Walaupun demikian, pada penelitian strategi komunikasi desa Panggungharjo ini lebih memfokuskan pada proses perencanaan sampai pada implementasi yang diharapkan bisa memberikan gambaran rule pendekatan dan model yang dipakai untuk acuan dalam pembuatan program pembangunan. Bisa dikatakan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian di atas adalah pada ruang lingkup obyek penelitiannya.

2. Landasan Teori

a. Kemandirian Desa

Banyak tafsir pemahaman tentang kemandirian desa atau desa, salah satunya adalah menurut CIFOR yang dihasilkan dari penelitian survei di Kabupaten Malinau Kaltim tentang pemahaman berbagai pihak mengenai pengertian desa mandiri dalam Sutoro Eko.⁹ Dari berbagai hasil wawancara tim diperoleh pemahaman tentang desa mandiri sebagai berikut, Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. *World Wide Fund for Nature*, Kayan Mentarang memahami desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan

⁹ Sutoro Eko bersama kawan-kawan, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014. Hal. 77

memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Mitra Samya, mitra strategis ACCESS, memahami kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial. Berdasarkan definisi itu, Mitra Samya menunjukkan bahwa kemandirian desa memiliki beberapa ciri:¹⁰

- 1) Kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
- 2) Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran-satu desa satu perencanaan, sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisten.

¹⁰ Widuri, Diah dan Patje Saubaki. *Partisipasi Warga dalam Penanggulangan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Stock Take: Manfaat Program ACCESS terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. IRE Yogyakarta Bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, 2012.

- 3) Sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya.
- 4) Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Definisi dan ciri khas desa mandiri ala Mitra Samya itu tidak hanya meletakkannya dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa, tetapi juga memasukkan komponen demokrasi, yakni relasi desa dengan warga. Demokrasi tampaknya merupakan prasyarat yang harus ada dan fondasi bagi kemandirian desa. Dalam praktik, kemandirian desa diwujudkan dalam bentuk kemampuan desa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan, sebagaimana hadir dalam program-program sektoral seperti Desa Mandiri Energi (desa mampu menghasilkan dan mencukupi kebutuhan energi dengan memanfaatkan aset atau potensi lokal) maupun Desa Mandiri Pangan (desa mampu menghasilkan dan mencukupi kebutuhan pangan).

Selain itu, ukuran yang dijadikan dasar sebagai indikator kemandirian desa bisa dilihat pada catur Sakti Undang-undang Desa yang disederhanakan dalam Tri Sakti Nawa Cita. Adapun kreteria-kreteria tersebut adalah:¹¹

¹¹ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan

- 1) Kekuatan sosial yang kondusif, dimana dipahami bahwa desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi.
- 2) Berdaulat secara politik, Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Jakarta. Hal. 14-16.

untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

- 3) Berdaulat secara ekonomi, Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarian, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang.

b. Komunikasi Efektif

Untuk memahami seperti apa itu komunikasi, alangkah lebih baiknya kita bermula dari teori Lasswell yang di anggap sebagai tonggak lahirnya ilmu komunikasi. Menurut Lasswell cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, "*Who Says What In Which Chanel To Whom With What Effect*, atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?¹² Berdasarkan definisi Lasswell tersebut ada lima komponen komunikasi yang saling bergantung satu sama lain yaitu: komunikator (sumber), Pesan, media,

¹² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011. hal 100.

komunikasikan (penerima) dan efek. Sehingga dari paparan ini bisa dimaknai bahwa pengertian komunikasi secara umum adalah sebuah proses pengiriman pesan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran tertentu baik secara langsung/ tidak langsung dengan maksud memberikan effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikan.

Senada dengan hal tersebut yaitu Gamble dan Gamble juga mendefinisikan, komunikasi sebagai tindakan sengaja atau ketidaksengaja dalam mengirim sebuah pesan. Komunikasi terjadi pada tataran komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi masa, dan komunikasi secara *online*.¹³

Dari beberapa definisi diatas bisa difahami bahwa esensi komunikasi adalah adanya perubahan sikap dan tindakan sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Dalam konteks komunikasi yang efektif, keberhasilan komunikasi bisa ditentukan oleh kredibilitas dan kratifitas seorang komunikator dalam merencanakan dan menentukan strategi dalam mengolah dan mengirimkan pesan sehingga pesan yang dikirim bisa difahami lebih mudah dan menimbulkan pengaruh terhadap diri komunikan berupa respons atau tindakan.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai

¹³ Gamble, Teri Kwal, dan Michael Gamble. *Communication Works*. New York: McGraw-Hill. 2005, hal.28

peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikianlah pula strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi.

Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (*planned multi-media strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda:¹⁴

- 1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
- 2) Menjembatani “*cultural gap*” akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: teori dan Praktek*, Remaja, Rosdakarya, Bnadung, 2000, hal.300.

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Banyak teori komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi untuk strategi komunikasi teori yang memadai baiknya untuk dijadikan pendukung strategi komunikasi ialah apa yang dikemukakan oleh Horald D. Lasswell yaitu cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*” komponen komunikasi yang berkolerasi secara fungsional pada paradigma Lasswell itu merupakan jawaban pertanyaan yang diajukan; (1) Who Siapa: Komunikator; (2) Says What Mengatakan apa: Pesan; (3) In Which Channel Melalui saluran apa: Media; (4) To Whom Kepada siapa: Komunikan; (5) With What Effect Dengan efek apa: Efek.

1. *Who (Komunikator)*

Dalam proses komunikasi ada komunikator, yaitu orang yang mengirim dan menjadi sumber informasi dalam segala situasi. Penyampaian informasi yang dilakukan dapat secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. *Says What (Pesan)*

Komunikator menyampaikan pesan-pesan kepada sasaran yang dituju. Pesan yaitu sesuatu yang dikirimkan atau yang disampaikan. Pesan yang disampaikan dapat secara langsung

maupun tidak langsung dan dapat bersifat verbal maupun non verbal.

3. In Which Channel (Media yang digunakan)

Dalam menyampaikan pesan-pesannya, komunikator harus menggunakan media komunikasi yang sesuai keadaan dan pesan disampaikan. Adapun media adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

4. To Whom (Komunikan)

Komunikan merupakan individu atau kelompok tertentu yang merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses komunikasi ini sebagai penerima pesan. Dalam hal ini komunikator harus cukup mengenal komunikan yang dihadapinya sehingga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dari pesan yang disampaikan.

5. With What Effect (Efek)

Efek adalah respon, tanggapan atau reaksi komunikasi ketika ia atau mereka menerima pesan dari komunikator. Sehingga efek dapat dikatakan sebagai akibat dari proses komunikasi. Dengan berpolakan formula Lasswell itu, komunikasi didefinisikan sebagai “proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang menimbulkan efek”.¹⁵

¹⁵ Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat; Study Komunikologis, Rosdakarya,

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami strategi komunikasi dan memahami model strategi komunikasi yang digunakan oleh Desa Panggungharjo dalam proses pembangunannya.

Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilakunya, proses perencanaannya, mekanisme sosialisasinya dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara

Bandung, 1991. Hal.68

jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang proses perencanaan strategi komunikasi dan penentuan model atau pendekatan strategi komunikasi dalam upaya pembangunan desa di Desa Panggungharjo.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *stake holder* di Desa Panggungharjo. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi untuk menghasilkan sarjana yang diharapkan akan punya kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁶ Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

a. *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Adapun narasumber atau

¹⁶ Moleong J. Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung, 2001. hal. 48

informan dalam penelitian ini meliputi semua unsur stoke holder Desa Panggungharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu lembaga yang disesuaikan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian serta sejarah dan company profile, dokumentasi rapat dan program pemerintahan desa.

4. Informan

Penelitian mengenai komunikasi Efektif Aparatur Desa ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jajaran Aparatur Desa (pemerintah Desa)
- b. Opinion leader (kepala suku, kepala dukuh, tokoh masyarakat)
- c. Warga desa (pemuda, golongan tua, ibu-ibu, bapak-bapak)
- d. Pelaku usaha mandiri

5. Informan

Penelitian ini hanya memfokuskan satu permasalahan yaitu komunikasi efektif aparatur desa Desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa. Adapun kemandirian desa bisa dilihat dari tiga indikator yaitu, kemandirian sosial, kemandirian politik, dan kemandirian ekonomi. Meskipun demikian peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana strategi komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Aparatur Desa dalam mewujudkan kemandirian desa dengan program pembangunan Desa yang sudah dilaksanakan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lofland and Lofland dalam Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁷ Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁷ Moleong J. Lexy. Metode penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosad Karya Bandung, 2001 hal. 112

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan penulis dengan steke holder desa Panggunharjo yang sudah dipilih menjadi informan sehingga data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

www.samudrabiru.co.id

BAB II

DESA PANGGUNGHARJO SEBAGAI DESA MANDIRI

A. Profil Desa Panggungharjo

1. Sejarah



Desa Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kelurahan yakni Kelurahan Cabeyan, Kelurahan Prancak dan Kelurahan Krapyak. Keberadaan Desa Panggungharjo tidak bisa dipisahkan dari keberadaan “Panggung Krapyak” atau oleh masyarakat sekitar disebut sebagai “Kandang Menjangan”, yang berada di Pedukuhan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo.

Sebagaimana diketahui bahwa Panggung Krapyak adalah merupakan salah satu elemen dari ‘sumbu imajiner’ yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat – Panggung Krapyak dan Parangkusumo yang berada di pantai selatan. Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1947 yang dengan keputusan dewan pemerintah tersebut pula, Hardjo Sumarto, diangkat sebagai Lurah Desa Panggungharjo yang pertama.

Berdasarkan fakta dan bukti sejarah, Akar Budaya di desa Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya, yaitu:

- a. Pada abad ke 9-10 Desa Panggungharjo adalah merupakan kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Sehingga dari budaya agraris ini muncul budaya seperti: Gejok Lesung, Thek-thek/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah merupakan pengormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

- b. Pada abad ke 16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo adalah merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran sedo Krapyak – 1910), sedangkan pada Abad ke 17 kawasan ini merupakan sebagai tempat olahraga memanah kijang/menjangan dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB I – Panggung Krapyak 1760). Budaya yang dibawa dari intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat budaya sehingga menumbuhkan budaya adiluhung seperti: Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak, Kerajinan Tatah Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan Tenun Lurik, Batik, Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik, dan lain-lain.
- c. Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren Al Munawir, sehingga berkembang budaya seperti: Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh, Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti: Syuran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro' Mi'roj), Ruwahan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan Ramadhan), Selukuran (Nuzulul Qur'an), dan lain-lain.
- d. Sekitar tahun 1900-1930 berkembanglah budaya yang tumbuh dan berkembang karena adanya

kebutuhan bersosialisasi dimasyarakat, sehingga berkembanglah bermacam-macam dolanan anak seperti: Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Nekeran, Umbul, Ulur/layangan, Wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang memproduksi permainan anak tempo doeloe, seperti: Othok-Othok, Kitiran, Angkretek, Keseran, Wayang Kertas, dan lain-lain

- e. Pada Tahun 1980 di desa Panggungharjo yang merupakan wilayah sub-urban mulai berkembang Budaya Modern Perkotaan dan banyak mempengaruhi Generasi Muda, sehingga berkembanglah kesenian Band, Drum band, Karnaval Takbiran, Tari-tarian Modern, Campur Sari, Outbond, Playstation/Game Rental, dan lain-lain.

2. Wilayah

Secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha. Tabel berikut ini adalah nama dan luas pedukuhan yang berada di desa Panggungharjo.

No.	Nama Pedukuhan	Jumlah RT	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Krapyak Wetan	12	26.045,0	4,93
2	Krapyak Kulon	12	35.960,0	6,81
3	Dongkelan	10	28.681,5	5,43
4	Glugo	12	41.155,0	7,79

5	Kweni	8	38.431,5	7,28
6	Pelemsewu	10	47.685,0	9,03
7	Sawit	5	50.340,5	9,53
8	Pandes	6	30.206,0	5,72
9	Glondong	8	58.767,5	11,13
10	Jaranan	6	32.955,0	6,24
11	Geneng	7	35.801,0	6,78
12	Ngireng-ireng	7	29.050,0	5,50
13	Cabeyan	8	37.061,0	7,02
14	Garon	7	35.967,5	6,81
Total		118	560,966,5	100,0

Sumber: Data monografi desa tahun 2015

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang secara langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota D.I. Yogyakarta. Secara lebih lengkap batas-batas desa Panggungharjo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Kota Yogyakarta
- b. Sebelah timur: Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon
- c. Sebelah Selatan: Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon
- d. Sebelah Barat: Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon dan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, Desa Panggungharjo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang ini juga berarti merupakan kawasan strategis ekonomi.

Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan penggunaan lahan dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan didesa Panggungharjo mengalami perubahan cukup signifikan terutama pada lahan jenis tanah sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju sekitar 2% per tahun. Ditinjau dari aspek pertanian, tingginya laju perubahan lahan sawah menjadi tanah kering ini perlu dikendalikan agar luasan lahan pertanian yang masih ada tetap mampu mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

3. Pembagian Wilayah

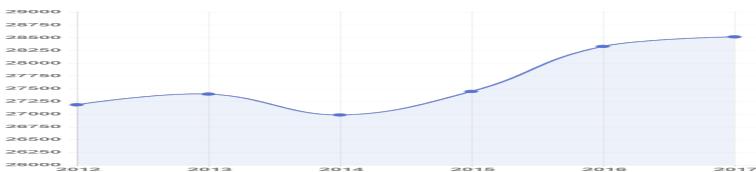
Pembagian wilayah Desa Panggungharjo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi:

- a. Kawasan Pertanian (Kring Selatan); Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian meliputi Pedukuhan Garon, Cabeyan, Ngireng Ireng, Geneng dan Jaranan. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Desa Panggungharjo.
- b. Kawasan Pusat Pemerintahan (Kring Tengah); Dimana Balai Desa Panggungharjo berada dan merupakan pusat Pemerintahan Desa meliputi Pedukuhan Pelemsewu, Kweni, Sawit, Glondong dan Pedukuhan Pandes.

- c. Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Kring Utara); Yang sering disebut kring utara (sebelah utara ring road) telah berkembang menjadi aglomerasi perkotaan yang disebabkan alih fungsi tanah persawahan ke pemukiman cukup tinggi meliputi Pedukuhan Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Dongkelan dan Pedukuhan Glugo.

4. Kependudukan

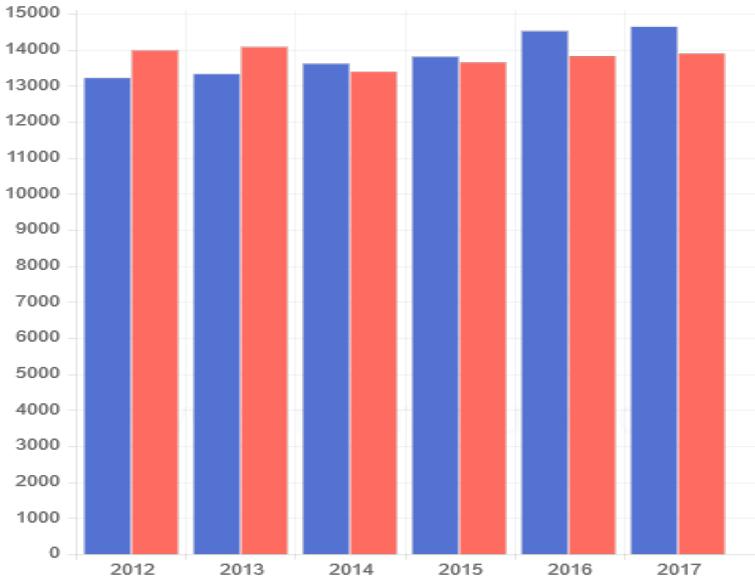
Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Desa Panggungharjo sebanyak 28.515 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 14.632 jiwa dan perempuan 13.883 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, terjadi penambahan sebanyak jiwa atau mengalami pertumbuhan rata-rata 0,7% dari 28.327 jiwa. Pedukuhan dengan tingkat kepadatan tertinggi terjadi di kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta (kring utara) yaitu Pedukuhan Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, dan Dongkelan. Adapun grafik jumlah peningkatan penduduk dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2012 - 2017

a. *Laju Pertumbuhan Penduduk*

Selengkapnya proporsi penduduk Desa Panggungharjo dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat disampaikan dalam grafik berikut:

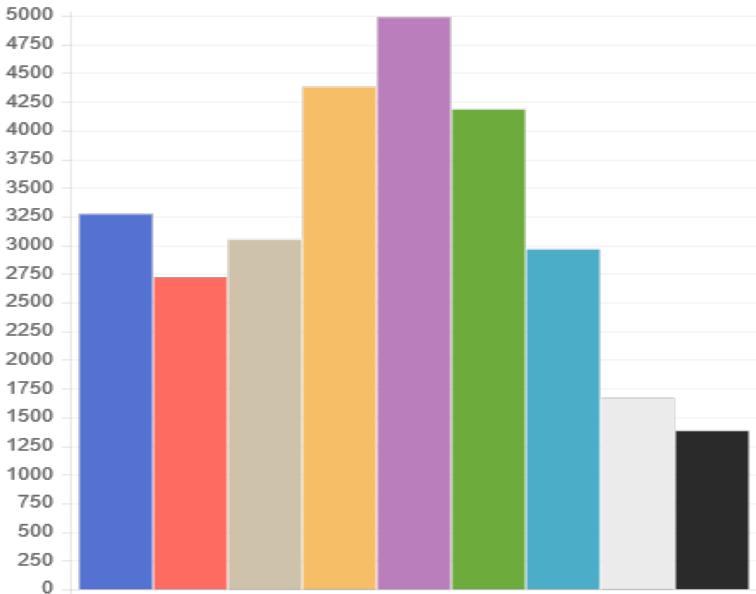


Proporsi Penduduk Tahun 2012-2017

Keterangan; Biru: Laki-laki, Merah: Perempuan

Dengan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak jika dibandingkan desa-desa yang lain, tuntutan masyarakat bagi pemerintah desa guna menghadirkan pelayanan yang prima menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Adapun proporsi penduduk Desa Panggungharjo berdasarkan usia, agama, pendidikan, jenis pekerjaan dan difabel disampaikan dalam grafik berikut:

b. Kependudukan berdasarkan Usia

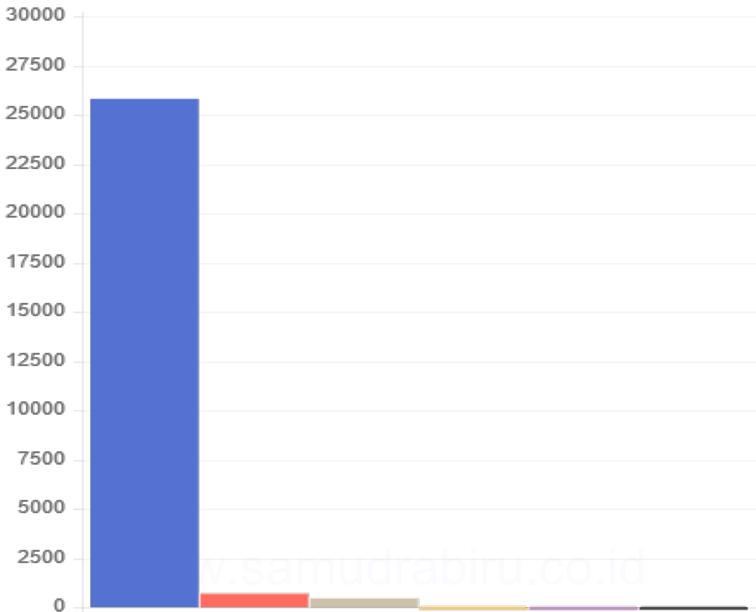


Sumber: Berdasarkan Data Profil Desa Semester II Tahun 2017

Keterangan:

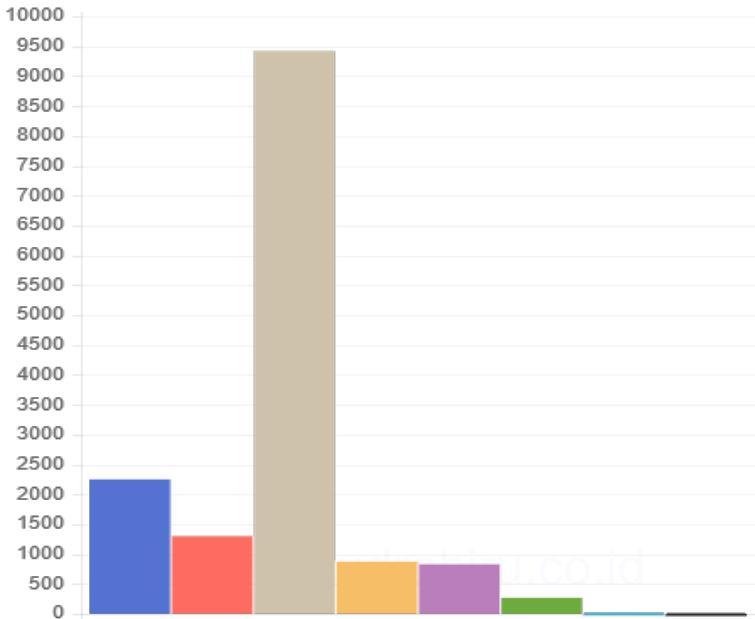
- Masa Balita 0-5 Tahun
- Masa Kanak-Kanak 6-11 Tahun
- Masa Remaja Awal 12-16 Tahun
- Masa Remaja Akhir 17-25 Tahun
- Masa Dewasa Awal 26-35 Tahun
- Masa Dewasa Akhir 36-45 Tahun
- Masa Lansia Awal 46-55 Tahun
- Masa Lansia Akhir 56-65 Tahun
- Masa Manula 65 Tahun Ke-atas

c. Agama



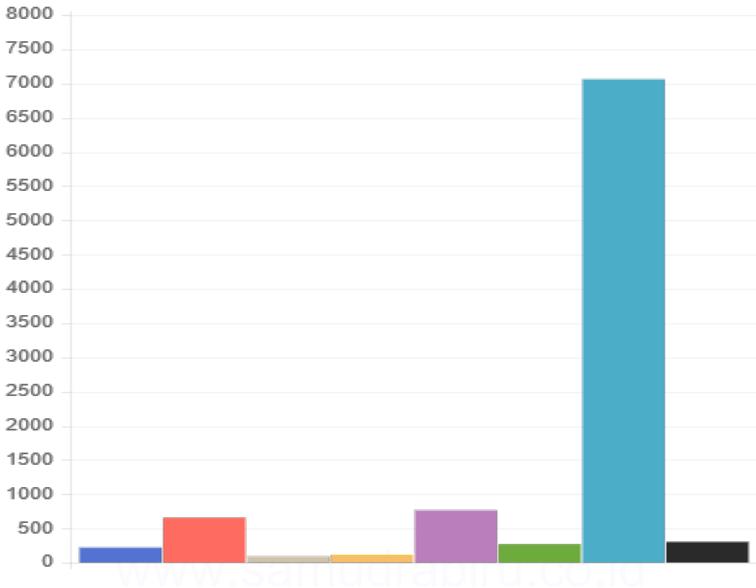
- Islam
- Katholik
- Kristen
- Hindu
- Budha
- Lainnya

d. Pendidikan



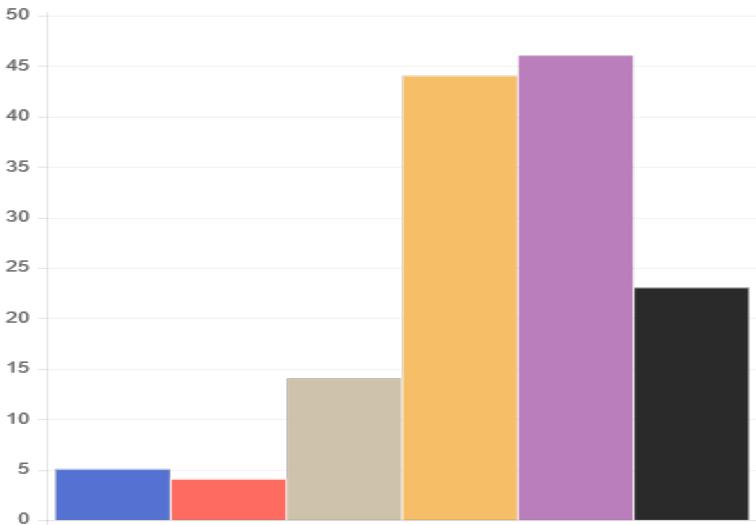
- SD / Sederajat
- SMP / Sederajat
- SMA / Sederajat
- D-3 / Sederajat
- S-1 / Sederajat
- S-2 / Sederajat
- S-3 / Sederajat
- SLB A

e. *Pekerjaan*



- Buruh Tani
- Pegawai Negeri Sipil
- TNI
- POLRI
- Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar
- Purnawirawan/Pensiunan
- Buruh Harian Lepas
- Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis.

f. *Difabel*



Difabel

- Tuna Rungu
- Tuna Wicara
- Tuna Netra
- Tuna Daksa
- Tunagrahita
- Tuna Laras.

B. Kelembagaan Desa Panggunharjo

1. Visi

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat desa Panggunharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa Panggunharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bersih dalam arti pemerintahan dijalankan dengan dilandasi dengan niatan yang tulus ikhlas dan suci serta dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.
- b. Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Bertanggung Jawab dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

- d. Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- e. Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Panggunharjo yang dengan prakarsa dan potensi lokal mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- f. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Panggunharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Berkesadaran lingkungan dalam arti bahwa kelestarian lingkungan dijadikan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan.

2. Misi

Adapun yang menjadi Misi pemerintah desa Panggunharjo yang juga merupakan pernyataan tentang

tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Panggunharjo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan yang professional melalui peningkatan tata kelola pemerintah desa yang responsive dan transparan.
- b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
- c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif.
- e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah.

Selanjutnya dalam menciptakan misi-misi tersebut nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif (keterlibatan); Setiap anggota masyarakat Panggunharjo mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat

harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

- b. Transparan (keterbukaan); Adanya sifat keterbukaan pemerintah desa Panggunharjo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Demokratis; Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.
- d. Efektif dan Efisien; Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
- e. Berbudaya; Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

www.samudrabiru.co.id

BAB III

PERENCANAAN KOMUNIKASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA

Pada dasarnya bab ini akan mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana komunikasi efektif yang dilakukan oleh Perangkat Desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa. Namun sebelum masuk pada pembahasan pokok tersebut, peneliti mengawalinya dengan menguraikan terlebih dahulu konsep-konsep yang menjadi landasan peneliti untuk mencari jawaban bagaimana komunikasi efektif yang dilakukan. Adapun konsep atau alat ukur yang digunakan adalah perencanaan komunikasi dan strategi komunikasi.

Dalam pembahasan perencanaan komunikasi, pembahasan lebih menekankan pada bagaimana proses analisis permasalahan yang sudah dilakukan dengan menitik-beratkan pada pembacaan terhadap iklim dan budaya masyarakat desa Panggungharjo dalam merumuskan tujuan pembangunan. Selain itu juga proses penentuan khalayak yang menjadi segmentasi program juga menjadi sub bahasan tersendiri dari pembahasan ini. Subpembahasan

mengenai penentuan pendekatan komunikasi yang dipilih sebagai pendekatan dalam menjalankan program juga akan dibahas lebih mendalam. Pada pembahasan mengenai strategi komunikasi, secara khusus akan mendeskripsikan dua hal penting untuk menggambarkan secara keseluruhan strategi komunikasi yang dilakukan. Pertama, menekankan pada pembahasan seperti apa pesan yang ingin disampaikan (perumusan pesan). Kedua, membahas media atau saluran komunikasi apa saja yang digunakan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Mewujudkan kemandirian desa merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan tenaga dan pikiran yang maksimal. Bisa dimaknai bahwa kemandirian desa juga merupakan sebuah proses perubahan sosial dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial dari upaya mencapai tujuan pembangunan yang bersifat umum. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Rogers yang dikutip oleh bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebenaran, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang maksimal agar dapat menopang keberhasilan dari tujuan pembangunan tersebut. Dimana

dalam konteks skala kecil tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah terciptanya kemandirian desa yang mensyaratkan partisipasi dari setiap komponen desa demi menciptakan kedaulatan desa. Tentunya dalam upaya ini sangat diperlukan sebuah perencanaan komunikasi sebagai landasan untuk bergerak dalam rangka memperoleh presepsi bersama dari masyarakat sehingga bisa menghadirkan internalisasi yang sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut. Untuk memahami lebih jauh bagaimana perencanaan komunikasi yang sudah dilakukan oleh perangkat desa Panggungharjo akan dibahas pada sub-sub pembahasan dibawah ini:

A. Tujuan Komunikasi

1. Analisis Permasalahan

Secara garis besar, peran besar dalam perencanaan pembangunan desa dimotori oleh Kepala Desa Panggungharjo yaitu Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Sejak terpilihnya Wahyudi Anggoro menjadi Kepala Desa dengan mekanisme pemilihan yang demokratis (tanpa money politik) pada tahun 2012 perlahan-lahan memberikan proses perubahan pembangunan desa yang signifikan. Perubahan tersebut bisa dilihat bagaimana kesadaran masyarakat terbangun dengan keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan di Desa, salah satunya adalah terbentuknya lembaga-lembaga desa yang dibentuk atas inisiasi warga.

“Saya tidak percaya sebelumnya kalau desa panggungharjo mendapatkan penghargaan menjadi Desa terbaik. Akhirnya kita baru sadar bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak Kepala Desa adalah yang terbaik buat kita. Sebelumnya kita tidak tahu seperti apa tujuan atau sasaran kedepan dari kepemimpinan pak lurah pada awalnya. Setelah mendapatkan penjelasan yang terus menerus dan juga ketekunan beliau dalam memberikan keteladanan akhirnya kita sedikit faham apa yang menjadi visi dan misi beliau ke depan. Saya tidak tahu lebih jelas seperti apa proses pembuatan perencanaan dan atas dasar apa, kita tahunya bahwa visi dan misi itu sudah ada dan kita tinggal melaksanakan sesuai dengan pemahaman kita. Terkadang juga yang menjadi kendala dari apa yang saya lihat masih banyak warga yang belum memahami apa yang diinginkan oleh bapak Wahyudi, tapi saya yakin lama-kelamaan para warga akan memahaminya.”

Perumusan tujuan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa panggungharjo didasarkan pada pembacaan yang mendalam atas realitas yang dianggap sebagai sebuah hambatan dalam proses pembangunan Desa Panggungharjo secara umum. Hambatan-hambatan yang nampak adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan bersama yang dihadapi serta masyarakat sulit memahami akan visi dan misi pemerintahan desa yang sudah dibuat. Selain itu juga hambatan yang dihadapi adalah pada kesalahan persepsi baik oleh masyarakat sendiri

maupun aparat pemerintah tentang tugas dan tanggung jawab aparatur desa sebagai pemerintahan kecil di tingkat pedesaan.

Landasan analisis atas hambatan-hambatan yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Panggungharjo tersebut dilandaskan atas pemahaman kepala desa terhadap beberapa indikator yang harus maksimal dan terkoneksi dalam pelaksanaannya. Indikator-indikator tersebut bagi kepala Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mengukur kemampuannya untuk mengelola aset sebagaimana amanat dari undang-undang desa. Adapun indikator-indikator tersebut adalah *kapasitas sosial* (sumber daya yang dimiliki oleh warga desa), kapasitas politik dan kepemimpinan (sumber daya yang dimiliki oleh Kepala Desa), kapasitas proses dan birokrasi (sumber daya yang dimiliki oleh aparatur desa). Dari ketiga indikator tersebut yang menjadi kunci atas terwujudnya kemandirian desa adalah terletak pada kapasitas sosial yang dimiliki oleh warga desa. Sungguhpun demikian besarnya kapasitas sosial ini tidak serta merta bisa didorong menjadi modal sosial karena dalam perwujudannya mensyaratkan adanya kepercayaan.

Dalam konteks situasi yang ada, umumnya dalam konteks negara dan khususnya pada Desa Panggungharjo sendiri, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa sangatlah minim dan hampir tidak ada. Sehingga

fenomena inilah yang menyebabkan susahnyາ mendorong sumber daya bersama yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Dengan jumlah masyarakat yang banyak dan heterogenitas yang dimiliki menjadikan tantangan yang sangat berat dalam usaha untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Kalau ditelisik lebih dalam lagi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa ini muncul dari persepsi masyarakat yang terbentuk puluhan tahun dengan system yang tidak memberikan ruang kebebasan dan kedaulatan bagi desa untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimilikinya. Dari alasan ini munculah sebuah persepsi umum yang difahami oleh seluruh masyarakat bahwa tugas dan kewenangan pemerintah desa selama ini adalah hanya pada sector admistrasi public. Sehingga hal ini menyebabkan tingkat pemahaman yang masih minim akan visi dan misi yang sudah ditetapkanny dan perlu waktu yang lama untuk melakukan proses visioning baik kepada perangkat Desa maupun masyarakat secara luas.

“Hambatan yang paling besar yang dihadapi adalah mendidik masyarakat selain itu juga kita kesulitan dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Saya tidak mengerti nanti hasil akhirnya seperti apa. Yang paling berat dilakukan juga adalah bagaimana memahami

masyarakat tentang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Desa. Hambatan-hambatan tersebut menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang bersumber dari pemahaman masyarakat selama ini dan merupakan warisan system terdahulu yang menganggap bahwa tugas pemerintahan desa adalah sebagai pelayanan admistrasi public. Merubah presepsi itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi saya.”

Selain kepercayaan, syarat berikutnya yang harus dilakukan untuk mendorong kapasitas sosial untuk menjadi modal sosial adalah *kapabelitas*. Dalam varian ini, dibagi menjadi tiga aspek yaitu; kapabelitas sosial, kapabelitas ekonomi dan kapabelitas politik. Dari ketiga aspek ini, aspek yang menjadi kunci untuk menunjang efektifitas aspek lainya adalah terletak pada aspek sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan kapabelitas sosial adalah hilangnya ruang-ruang sosial sebagai wadah untuk mendiskusikan solusi dalam menyelesaikan masalah bersama berubah menjadi ruang-ruang sosial yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat pragmatis. Misalnya adalah adanya distorsi pertemuan-pertemuan warga seperti pertemuan dasawisma, pertemuan pemuda, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainya yang merupakan ruang sosial warga yang seharusnya digunakan untuk membicarakan permasalahan warga berubah menjadi media arisan dan simpan pinjam. Selain

itu pertemuan-pertemuan yang dilakukan juga hanya membicarakan masalah yang bersifat pragmatis tidak pada permasalahan substantif yang merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh warga.

Dengan kondisi yang seperti itu, ditambah lagi dengan pengaruh kapitalisme dan globalisasi mengukuhkan terbentuknya masyarakat yang stagnan. Dalam konteks ini didefinisikan oleh Kepala Desa Panggungharjo sebagai masyarakat yang tidak produktif dalam mencari solusi atas permasalahan sosial bersama. Individualisme yang menyebabkan hilangnya kepedulian sosial terhadap sesama warga menghadirkan iklim dalam pertemuan pada ruang sosial yang terbentuk menjadi media untuk menghilangkan kepenatan dan menjadi hiburan, serta menghilangkan rasa lelah setelah beraktifitas sehari penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

“Ruang-ruang sosial yang digagas oleh masyarakat desa sepenuhnya berhenti pada situasi pengelolaan arisan, pengelolaan simpan pinjam. Sehingga waktu dan energy kita habis tersedot hanya mengurus hal-hal seperti itu. Waktu untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama misalnya sampah tidak ada lagi. Jadi kelihatanya ruang-ruang sosial yang ada kebanyakan dan pasti hanya digunakan untuk membahas masalah yang bersifat pragmatis. Maksudnya hanya pada masalah-masalah kasar, misalnya jalan rusak, gardu rusak dan lain-lain. Anak tetangga putus sekolah bukan masalah, tetangga

ketangkap karena kasus narkoba bukan masalah, tetangga hamil diluar nikah bukan masalah. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak bisa memahami dirinya sendiri. Seharusnya ruang-ruang sosial yang ada bisa memupuk kepekaan sosial tapi pada kenyataanya menjadi tidak produktif.”

2. Penentuan Tujuan dan Sasaran Komunikasi

Dari berbagai permasalahan mendasar yang sudah diuraikan diatas, hambatan terbesar yang dihadapi adalah minimnya kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Kiranya hal ini yang menjadi dasar terbentuknya apatisme masyarakat dan minimnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Bukan hanya itu saja, pemahaman masyarakat dan aparatur desa tentang tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemerintah Desa masih dipahami sebagai pelayanan yang bersifat administratif. Padahal secara ideal, tugas dan wewenang pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pemerintahan yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan segala sendi kehidupan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang demokratis dan masyarakat yang mandiri.

Selain kepercayaan, permasalahan yang dihadapi adalah pada aspek kapabelitas yang sudah diuraikan pada sub pembahasan diatas. Tentunya berdasarkan analisis yang mendalam atas potensi dan kondisi masyarakat Desa

Panggunharjo sulit merealisasikanya dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Atas dasar ini, inisiatif yang bisa diambil dalam periode kepemimpinan saat ini, bagaimana mewujudkan kapasitas sosial yang bisa mendorong terciptanya aspek kapasitas ekonomi dan kapasitas politik warga secara signifikan. Selain mendorong aspek kapasitas lainnya, perwujudan kapasitas sosial juga bisa dipakai sebagai ukuran dari terciptanya kepercayaan warga yang bersifat kondusif. Dengan terbentuknya modal sosial (partisipasi aktif) warga, bisa menjelaskan kondisi iklim kepercayaan dan budaya warga yang produktif dengan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah bersama yang dihadapi oleh warga Desa.

Pada aspek kemandirian desa seperti yang dijelaskan pada konsep pemikiran dalam penelitian ini, kemandirian desa bisa dilihat melalui tiga aspek yaitu: *pertama*, kekuatan sosial yang kondusif, dapat dipahami bahwa desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi.

Kedua, berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru dapat melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga untuk menggantikan imposisi sekaligus dapat menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

Aspek *ketiga* berdaulat secara ekonomi. Kedaulatan dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi berupa aset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam yang hanya memeperhatikan pertumbuhan ekonomi semata maka tugas desa memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang.

Bisa dipahami, jika dikaitkan dengan landasan pemikiran yang menjadi dasar permasalahan untuk membuat perencanaan komunikasi pembangunan desa seperti yang sudah diuraikan di sub pembahasan di atas ada korelasi yang kuat. Dimana ketiga konsep ini bisa kita temukan pada salah satu indikator penentu kemampuan Desa dalam mengelola aset yang menjadi landasan Kepala desa dalam menganalisis permasalahan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan Desa. Adapun indikator tersebut adalah kapasitas sosial yang meliputi, kapabilitas Sosial, kapabilitas ekonomi dan kapabilitas politik yang dianggap sebagai kunci dalam menciptakan kemandirian desa.

Kapabilitas sosial merupakan modal sosial yang tercipta dari potensi masyarakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan dalam ruang lingkup yang demokratis dan berkeadaban. Adanya ruang-ruang sosial yang sudah terbentuk maupun baru terbentuk dapat menjadi ruang dirkursus yang penuh aspirasi dengan mengedepankan produktifitas atas usaha dalam menyelesaikan problem bersama. Selanjutnya potensi tersebut didukung dan difasilitasi oleh pemerintah desa dengan sokongan pendanaan sehingga bisa menghasilkan *output* bagi kelangsungan dan kemajuan kehidupan warga Desa.

Kapabilitas politik merupakan sebuah kemampuan warga desa agar bisa kritis dan memberikan control atas

setiap kebijakan baik dari desa maupun kebijakan yang bersifat lebih luas. Kemampuan yang dimaksud merupakan sebuah kemandirian dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk memperoleh sebuah solusi atas problematika yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan bersama demi mencapai kehidupan yang sejahtera, aman dan sentosa. Dalam perwujudan kapabilitas politik ini tanpa disertai dengan kapabilitas sosial yang masif maka sulit dalam mewujudkannya.

Kapabilitas ekonomi merupakan kemampuan sumber daya desa dalam mengelola aset-aset yang dimiliki desa secara optimal dan berkelanjutan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan sebuah iklim yang terbangun dari rasa kebersamaan yang syarat dengan rasa memiliki, rasa kekeluargaan, rasa kepedulian terhadap sesama, rasa berbagi dan adanya inovasi-inovasi baru yang mampu menghadirkan perubahan terhadap taraf hidup yang ideal bagi masyarakat desa. Dalam mewujudkan kapabilitas ekonomi, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya perlu adanya pengetahuan yang masif atas *financial literacy*, kemampuan dalam mengelola kompensasi, kemampuan dalam pembangunan infrastruktur, serta pengetahuan yang kritis dan keberanian untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul akibat bauran kapitalisme yang bersifat umum dan khususnya pada praktek ekonomi di Desa.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas dan didasarkan pada analisis permasalahan yang sudah dilakukan, ada beberapa asumsi yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan tujuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa yang berorientasi kepada terciptanya kemandirian desa. Asumsi pertama, mewujudkan kemandirian desa merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu cukup panjang karena berhubungan dengan penciptaan pemahaman kognitif dan pembangunan kesadaran masyarakat. Asumsi kedua, mewujudkan kapasitas sosial yang kemudian didorong menjadi modal sosial. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kepercayaan dan kapabilitas.

Atas dasar asumsi tersebut maka tujuan atau target yang hendak dicapai dalam periode awal¹⁸ adalah bagaimana menciptakan kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah sebuah hubungan harmonis antara sumber daya masyarakat dengan sumber daya aparatur desa, hubungan harmonis antara sumber daya warga dengan pemimpin desa dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan mekanisme atau aturan yang telah ditetapkan sebagai acuan setiap kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Dapat juga dengan bahasa yang sederhana dipahami bahwa iklim kepercayaan yang ingin

¹⁸ Pada saat dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggoro H., Kepala Desa Panggungharjo, beliau adalah Calon *incumbent* yang terpilih lagi menjadi Kepala Desa periode 2018 s/d 2023 yang belum dilantik.

diciptakan merupakan langkah awal yang menjadi jembatan bagi terciptanya kapabilitas secara umum.

B. Khalayak dan Pendekatan Komunikasi

Panggungharjo merupakan salah satu desa di kabupaten Bantul yang mempunyai wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha. Jumlah penduduk desa Panggungharjo sekitar 28.515 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 14.632 jiwa dan perempuan 13.883 jiwa. Dengan wilayah yang relatif luas dan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak jika dibandingkan desa-desa yang lain serta tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa guna menghadirkan pelayanan prima demi terwujudnya kemandirian desa.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah dengan memfokuskan pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan dengan menghadirkan rasa kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Implementasi dari tujuan tersebut yaitu memfokuskan pada terwujudnya kapasitas sosial dengan program-program yang mendukung terbentuknya kapabilitas sosial, kapabilitas politik dan kapabilitas ekonomi pada individu warga Panggungharjo. Adapun penentuan khalayak dan pendekatan komunikasi

bisa dilihat dari implementasi program-program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Fisik

Program pembangunan fisik merupakan upaya pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas umum berupa pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan demi memperlancar kegiatan warga berdasarkan kebutuhan warga. Luasya wilayah dengan karakteristik dan potensi yang berbeda dari masing-masing wilayah desa Panggungharjo menyebabkan pemenuhan yang berbeda-beda pula dalam pembangunan infrastrukturnya. Misalnya ada beberapa daerah yang butuh pembangunan perbaikan jalan, ada juga daerah tertentu yang minta disediakan gedung untuk melaksanakan program PAUD, ada beberapa daerah juga yang dibangun tempat untuk pengelolaan sampah.

Dalam implementasinya, perencanaan obyek pembangunan fisik selalu melibatkan warga masing-masing wilayah yang difasilitasi oleh koordinator wilayah masing-masing. Selain itu, penentuan objek pembangunan juga ditentukan oleh kebijakan pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa yang diikat oleh undang-undang. Tentunya hal ini terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu berupa perubahan rencana demi menjalankan aturan pusat. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Hosni Bimo Wicaksono Kasi Pelayanan Desa Panggungharjo,

“Dalam pembangunan selalu melibatkan keterlibatan warga dalam proses perencanaan sampai evaluasinya. Misalnya terkadang kita harus melakukan rapat mendadak untuk menyelesaikan kendala jika beberapa program yang sudah direncanakan harus dirubah karena perintah dari pusat, sehingga beberapa warga terkadang mempertanyakan kenapa harus dirubah padahal perubahan itu diwajibkan dari pemerintah pusat. Dari pelaksanaan dan pengerjaannya ada beberapa yang berbeda, misalnya dari segi fisik bahan yang sebelumnya sudah direncanakan menggunakan bahan A menjadi bahan B. 19”

Dalam implementasi program pembangunan fisik sosialisasi seringkali dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi formal dalam bentuk komunikasi kelompok ataupun dalam jumlah yang besar dalam bentuk komunikasi publik misalnya pada awal perencanaan pembangunan fisik melalui musyawarah desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Komunikasi formal dilakukan dengan memaksimalkan hirarki struktur keorganisasian desa guna memaksimalkan keterlibatan warga dalam pelaksanaannya. Misalnya memaksimalkan peran RT untuk membantu Bapak dukuh dan LKD (lembaga kemasyarakatan Desa) dalam melaksanakan musyawarah dengan warga untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan fisik desa. Adapun gambaran

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Hosni Bimo pada hari Jum'at, 19 Oktober 2018 Pukul 11.05 WIB di Kantor Kelurahan Desa Panggunharjo

secara detail bisa dilihat dari cuplikan wawancara dengan Ibu Sumiyati Dukuh padukuhan Glondong di bawah ini:

“Di dalam perumusan program pembangunan, masyarakat yang ada harus terlibat, seperti adanya tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan LKD, perwakilan RT, kepala padukuhan, aparat desa dan lainnya yang ikut dalam MUSRENBANDES (Musyawarah tingkat desa) yang setiap tahunnya diadakan. Dalam pembahasannya biasanya menentukan skala prioritas khususnya pada program pembangunan fisik yang berasal dari masukan warga melalui rapat RT dan kepala dukuh yang sudah disampaikan terlebih dahulu kepada kepala desa dan jajarannya. Selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut di sosialisasikan kepada warga melalui para ketua RT untuk membantu kinerja dukuh dan LKD yang anggotanya merupakan perwakilan warga. Dalam setiap ada agenda kegiatan dari pemerintah panggunharjo dukuh akan melakukan kumpul antarketua RT dan akan didiskusikan bersama. Dan dalam rapat ini membahas apa saja gagasan dari masyarakat yang ada dan akan dirapatkan dalam musyawarah ini dengan melibatkan para perwakilan tokoh masyarakat dari setiap RT, sehingga masyarakat terlibat dalam setiap perumusan program yang ada. Dan saluran dari pemerintah atas-kebawah dan dari bawah-keatas semuanya bersifat transparan.”²⁰”

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati pada hari Senin, 15 Oktober 2018 Pukul 19.30 Rumah ibu dukuh Sumiyati

Sungguhpun demikian, bentuk komunikasi nonformal pun juga dilakukan dengan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan satu arah. Komunikasi tatap muka biasanya dilakukan oleh kepala desa dengan kepala dukuh dan ketua RT serta warga dalam suasana yang sifatnya pribadi, misalnya dalam bentuk kunjungan. Tidak hanya Kepala Desa terkadang ketua RT dan Pak dukuh juga melakukan hal yang sama dengan melakukan komunikasi yang intens dengan warganya. Selanjutnya komunikasi satu arah biasanya dilakukan melalui media sosial berupa group-group WA yang ada walaupun sifat pesannya terkesan informatif dan konfirmatif. Selain itu juga komunikasi satu arah juga dilakukan melalui media informasi desa yaitu web Desa. Biasanya pesan yang disampaikan bersifat informatif dengan menggunakan narasi pemberitaan dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

“Selain melalui rapat-rapat, komunikasi yang kami lakukan dalam pelaksanaan program khususnya pembangunan yang sifatnya fisik adalah dengan pendekatan personal. Terkadang saya juga melakukan persuasif kepada warga dengan mengunjungi rumah warga yang memang mereka terlibat dalam proses pembangunan. Misalnya ada warga yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana pembangunan jalan, saya sampaikan kepada mereka. Karena pada dasarnya pelaksanaan pembangunan syaratnya warga harus dilibatkan. Selain itu dengan adanya program pembangunan fisik bisa

memberikan pekerjaan terhadap masyarakat, ada yang jadi tukang, ada yang jadi kuli bangunan. Dalam sosialisasi program yang sudah dilaksanakan biasanya masyarakat akan mendapatkan informasi berupa berita terkait tentang program yang sudah dilaksanakan lewat web Desa. Selain berita masyarakat juga bisa melihat langsung tentang perencanaan program setiap tahunnya dan besaran anggaran yang sudah ditetapkan lewat web desa. Namun tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan web karena mungkin factor usia. Sehingga biasanya informasi yang ada di web dishare di group-group wa yang sudah dibuat oleh warga.²¹”

2. Program Pembangunan Nonfisik

Sejak terpilihnya Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menjadi kepala desa pada tahun 2012, Salah satu calon kepala desa yang tidak menggunakan *money politic* menjadi momen kebangkitan desa Panggunharjo dalam pembangunan desa. Setelah terpilih, Wahyudi melakukan terobosan berupa program-program yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya program yang menjadi embrio dari beberapa program pemberdayaan yang fungsinya untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah program pengembangan sampah yang diberi nama KUPAS.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Raharjo kepala dukuh Pandes pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Pukul 14.30 di rumah bapak dukuh.

Selanjutnya pada tahun 2014 dengan ditetapkannya Undang-undang Desa yang secara tersirat merupakan upaya rekognisi dalam menjelaskan tentang keberadaan desa dan peranya dalam usaha pembangunan bangsa. Secara substansial difahami bahwa keberadaan UU Desa telah memberikan kedaulatan dan kewenangan desa dalam mengelola aset desa untuk mewujudkan kemandirian desa. Dalam perkembangannya setelah terbentuknya KUPAS, inovasi-inovasi lainnya juga lahir menjadi program-program pelayanan yang memberi manfaat pada kebutuhan warga dan menjadi wadah yang efektif dalam menciptakan kapasitas sosial warga. Inovasi-inovasi ini berawal dari aspirasi masyarakat, kemudian oleh Kepala Desa dianggap sebagai potensi yang mampu menjahit tumbuhnya kapasitas sosial dan kemudian dibentuklah lembaga-lembaga desa sebagai wadah untuk menjalankan aspirasi-aspirasi tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diulas pada penjelasan program-program pembangunan non fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga desa dibawah ini:

a. Program Kupas

Kupas didirikan pada awal tahun 2013 yang berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya volume sampah, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Pada mulanya program ini berangkat dari program pemberdayaan sampah di tingkat pedukuhan

melalui program pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Desa Panggungharjo, dengan pengembangan melalui program “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”. Secara resmi program pemberdayaan sampah ini diresmikan dengan nama KUPAS di tingkat desa pada tanggal 25 Maret 2013 sebagai program bersama yang diterapkan pada 14 padukuhan di Panggungharjo. Penetapan Unit KUPAS menjadi program utama desa ini kemudian diberi legitimasi dengan pembuatan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam praktik di lapangan, program pengelolaan sampah ini kurang mendapatkan simpati dari masyarakat secara luas. Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa khususnya kepala Desa dalam mensosialisasikan program ini. Selain karena kebiasaan membuang sampah masyarakat yang kurang tepat, minimnya pemahaman tentang dampak negative dari sampah dan minimnya kepedulian dalam mewujudkan lingkungan bersih juga menjadi faktor penghambat dalam realisasi program ini. Sehingga perlu waktu lama dalam merealisasikan program pengelolaan sampah ini hingga menjadi program yang produktif dan bermanfaat bagi warga. Dalam konteks ini Bapak setyo Raharjo dukuh padukuhan Pandes menjelaskan sebagai berikut:

“Program pengelolaan sampah yang awalnya menuai banyak masalah, karena banyak dari warga yang masih memiliki kebiasaan untuk menimbun sampah tanpa dikelola. Sehingga pemerintah desa melakukan banyak usaha karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat program yang sudah dibangun tidak akan berhasil, bahkan sebagai bentuk usaha pak lurah sendiri biasanya akan turun langsung mesosialisasikan program yang ada meski prosesnya lama.²²”

Program pemberdayaan sampah yang kemudian menjadi KUPAS merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat Desa Panggungharjo dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik di wilayah Desa Panggungharjo. Dalam beroperasi KUPAS berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu sasaran program ini adalah seluruh warga Panggungharjo dan khususnya adalah Bapak –bapak dan ibu-ibu rumah tangga, walaupun dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi pemuda desa Panggungharjo.

Selain peran aktif kepala desa dalam melakukan pendekatan personal terhadap masyarakat untuk memahami tentang pentingnya pengelolaan sampah. Sosialisasi juga dilakukan dengan memberikan materi-

²² Wawancara pada hari Jum'at, 19 Oktober 2018 Pukul 14.30 di Rumah bapak dukuh padukuhan Pandet.

materi tentang pentingnya lingkungan bersih dan inovasi-inovasi produktif yang menghasilkan income tambahan dari pengelolaan sampah pada rapat-rapat dan pertemuan warga ditingkat desa, padukuhan maupun RT. Sungguhpun demikian, efektifitas sosialisasi juga belum mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Adapun penyebabnya karena masih banyak pemahaman masyarakat yang masih berpikir untung dan rugi serta berpikir instan yaitu dengan membayar buruh sampah untuk mengambil sampah-sampah dilingkungan tempat tinggal mereka.

Atas dasar itulah maka dalam mengoptimalkan program Kupas selain sebagai sarana untuk mendidik masyarakat juga sebagai sarana untuk memupuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, Kepala desa membuat inovasi dengan memasukan program Kupas sebagai bagian unit usaha yang dikelola oleh BUMdes. Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini selain diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9x dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37.000.000,-. Senada dengan hal tersebut, Bapak Hosni Bimo Wicaksono seklaku KASI

pelayanan Desa Panggungharjo menjelaskan sebagai berikut:

“Fokus usaha pemerintah desa adalah melalui pengembangan potensi lokal melalui adanya BUMDES sejak 2013, karena tidak adanya alam untuk wisata seperti kelurahan lain potensi yang bisa diangkat adalah lebih ke sosial budaya dan juga permasalahan sampah menjadi potensi ekonomi yang sampai saat ini terus dikembangkan. Permasalahan sampah ini juga menjadi potensi dalam pengelolaannya, karena sekarang ini BUMDES sudah mengelola sampah rumah tangga sebanyak 9.000 KK (per bulan iuran 20rb dalam pengambilan sampah) dan dari sini juga menjadi pertumbuhan ekonomi yang ada didesa.²³

Dengan kemampuan usaha tersebut, melalui KUPAS telah membuka lapangan kerja paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit KUPAS juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang. Selain itu juga, hasil dari program KUPAS telah mampu membiayai program-program sosial desa seperti, kesehatan

²³ Wawancara dengan Hosni Bimo Wicaksono pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Pukul 11.05 di kantor Kelurahan Desa Panggungharjo.

gratis untuk para manula, kesehatan ibu dan anak-anak serta bantuan pendidikan yang dinaungi dalam program layanan JPS.

Secara substansi keberhasilan program KUPAS salah satunya di tentukan oleh bagaimana mekanisme sosialisasi kepada warga. Adapun pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam ranah mensosialisasikan program tersebut adalah dengan melakukan pendekatan persuasif secara personal. Pada awal pelaksanaan program ini, Kepala Desa selalu melakukan pendekatan personal kepada warga hingga dia selama beberapa bulan pernah menjadi tukang sampah dalam memberikan kataauladanan kepada warganya. Selain pendekatan personal, komunikasi dalam bentuk formal pun dilakukan lewat rapat-rapat warga, rapat pemerintahan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK, seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan materi pengelolaan sampah. Sungguhpun demikian, peran media sosial dan media online desa juga memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan program KUPAS ini. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan-pemberitaan terkait aktifitas dari implementasi program KUPAS yang telah memberikan informasi dan motivasi terhadap kesadaran dan perilaku warga dalam kepedulianya terhadap lingkungan yang bersih dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

b. Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)

Sebagai wujud nyata untuk menunjukkan peranannya terhadap pelayanan dan jaminan untuk masyarakat dan kelanjutan dari program KUPAS. Pemerintah Desa Panggungharjo pada tahun 2013 mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) yang mempunyai tugas pokok memberikan layanan sosial kepada masyarakat terutama bagi warga yang kurang mampu dengan harapan terwujudnya masyarakat Panggungharjo yang sejahtera. Selain itu landasan dibentuknya Bapel JPS adalah berdasarkan pada UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tertera bahwa “pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Bapel JPS merupakan sebuah lembaga desa yang tujuan menyelenggarakan program jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Desa Panggungharjo agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa atau masyarakat. Adapun bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Bapel JPS adalah berupa Layanan Kesehatan yang meliputi Layanan luar gedung, biaya konsultasi dan pemeriksaan medis, biaya

tindakan medis kecil/ sederhana, biaya pembelian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau obat yang tersedia di PP-JPS kesehatan sesuai indikasi medis, biaya pelayanan kegawat daruratan, homecare oleh Perawat Desa, pemeriksaan kehamilan selama 7 kali, Persalinan normal, pemeriksaan nifas selama 2 kali dan 5 imunisasi lengkap untuk bayi. Sedangkan pada Layanan untuk JPS Pendidikan meliputi, Layanan asuransi pendidikan dengan premi dibayar oleh Bapel JPS, Layanan beasiswa pendidikan, Layanan bantuan pendidikan tunai dan Layanan beasiswa kuliah gratis.²⁴

Inisiasi berdirinya Bapel JPS berasal dari ide Kepala Desa yang pada saat itu merasa gundah atas realitas yang ada. Kegundahan tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan dimana kehadiran pemerintah desa dipahami hanya hadir pada pelayanan di sector administrasi. Berdasarkan visi yang dibuat dan juga menitikberatkan pada tujuan yang ditetapkan yaitu membangun kepercayaan warga demi membangun kapasitas sosial yang kondusif, Bapel JPS dibentuk demi membangun pemahaman bahwa selain sebagai pelayan administrasi pemerintah desa juga hadir dalam memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian ide tersebut ditawarkan dalam diskusi pada rapat Desa dan kemudian mendapatkan apresiasi dari masyarakat

²⁴ Sumber dari website desa panggungharjo

desa dengan segera membuat perencanaan dalam pendirian Bapel JPS tersebut. Sungguhpun demikian, latar belakang berdirinya Bapel JPS juga berasal dari pengembangan program-program jaminan sosial yang sudah ada yang merupakan bagian dari inovasi output dari program KUPAS yang sudah berjalan.

Pada perkembangan pelaksanaan program-program pelayanan yang digagas oleh Bapel JPS telah melalui banyak hambatan. Adapun penyebab hambatan tersebut adalah putusnya komunikasi di tingkat struktur desa seperti jajaran kepala dukuh dan perangkat RT dengan masyarakat. Hal ini bisa dilihat masih adanya warga yang seharusnya berhak mendapatkan jaminan JPS belum terdata sebagai peserta JPS. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya pro aktif segenap pengurus Bapel JPS yang terdiri dari perwakilan beberapa padukuhan yang ada di Panggungharjo untuk turun kelapangan dan berkomunikasi dengan warga. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyudi Anggoro H. di bawah ini

“Hambatan masih ada karena terputusnya komunikasi. Instrument struktural yang seharusnya diharapkan mampu menyukseskan setiap program pada kenyataanya tidak efektif. Saya juga tidak tahu mengapa seperti ini. Kemungkinan hal yang paling mendasar Karen pemahaman struktur desa masih menganggap bahwa pelayanan public itu ya pelayanan administrasi seperti yang merka lakukan

puluhan tahun. Sehingga dalam konstruksi berfir mereka pelayanan jasa, pelayanan sosial bukan menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Berjalanya program-program JPS selama ini iya salah satunya ditentukan oleh komitmen dan konsistennya pengurus dan tim dari program JPS tersebut dalam mensosialisasikan kepada warga.²⁵”

Dalam upaya menyukseskan program-program Bapel JPS, kecenderungan pendekatan komunikasi yang dipakai adalah dengan menggunakan komunikasi dua arah yang bersifat antar personal yang dilakukan oleh pengurus atau tim Bapel JPS dengan warga. Selain satu arah, pendekatan dua arah juga menjadi konsentrasi dalam sosialisasi program ini. Adapun bentuk-bentuk komunikasinya adalah dengan membuka rubrik pelayanan pada web Desa Panggungharjo dan media center lewat media sosial maupun konvensional. Sungguhpun demikian, keterlibatan aparatur desa juga diperlukan akan tetapi pengaruhnya juga bisa dikatakan kurang signifikan.

c. *BUMDes Panggungharjo Lestari*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Adapun pedoman mengenai hal tersebut telah diperkuat

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panggungharjo (Eahyudi Anggoro) pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.00 di kantor BUMdes Panggungharjo.

oleh pemerintah dengan regulasi berupa pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Hadirnya peraturan baru tersebut telah memberikan angin segar bagi pemerintah desa Panggungharjo khususnya wahyudi Anggoro H. Selaku Kepala Desa Panggungharjo. Pada bulan maret 2013, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. BUMDes Panggung lestari merupakan bagian dari langkah Kepala Desa untuk mewujudkan tujuan awal yang menjadi embrio dalam mewujudkan kemandirian desa yaitu menciptakan kepercayaan warga terhadap birokrasi desa dengan berorientasi pada terciptanya kapabelitas sosial, kapabelitas ekonomi dan kapabelitas politik masyarakat.

Dalam perjalananya, BUMDes ini didirikan dari hasil musyawarah dengan beberapa lembaga desa, perangkat desa dan perwakilan warga yang diinisiasi oleh kepala desa. Ide awalnya adalah mengakuisisi program KUPAS sebagai unit usaha pertama yang dijalankan oleh BUMDes. Kemudian dibentuklah tim yang terdiri dari perwakilan warga yang bertanggungjawab untuk menjalankan BUMDes. Adapun

tujuan yang ingin dicapai dengan keberadaan lembaga ini adalah untuk membantu pemerintahan Desa dalam usaha mewujudkan kemandirian ekonomi, dimana nantinya diharapkan mampu memberikan output berupa pemasukan yang bersifat tetap bagi desa yang bisa digunakan pembiayaan untuk program-program Desa. Sungguhpun demikian, output lain yang diharapkan adalah mampu meningkatkan perekonomian warga dan penciptaan lapangan kerja buat warga.

Setelah beberapa tahun berjalan, perkembangan BUMDes bisa dikatakan sangat berhasil. Hal ini terlihat ada beberapa unit usaha produktif yang didirikan dan peningkatan signifikan pendapatan yang dihasilkan. Pada dasarnya keberhasilan yang dicapai didasarkan pada dua factor, diantaranya adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang dan jaringan serta kemampuan komunikasi dalam menumbuhkan partisipasi warga. Kemampuan memanfaatkan peluang dan jaringan didominasi oleh inisiator program dan lembaga, dalam konteks ini peranan kepala desa sungguh besar. Hampir semua program-program yang dibuat oleh setiap unit usaha BUMDes berasal dari ide Kepala Desa yang kemudian difahamkan kepada pengurus lembaga dan semua stake holder Desa Panggungharjo melalui beberapa proses komunikasi yang intens. Dari beberapa ide yang sudah menjadi program kebanyakan didasarkan pada pengembangan potensi

desa yang kemudian dikembangkan melalui kerjasama-kerjasama dengan instansi-instansi lain baik swasta maupun pemerintahan.

Faktor terpenting selanjutnya yang menunjang keberhasilan lembaga BUMDes adalah masifnya partisipasi warga dalam pelaksanaan program-program yang dicanangkan. Masifnya partisipasi yang ada tidaklah hadir dengan sendirinya, akan tetapi dibutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif. Dalam pelaksanaan setiap program BUMDes terkadang proses komunikasi yang dilakukan tidak sama, hal ini disebabkan pada target atau sasaran khalayak yang berbeda dari masing-masing program. Tapi secara garis besar aliran komunikasi yang dilakukan adalah dengan pendekatan komunikasi langsung baik itu dilakukan secara formal maupun nonformal. Biasanya pada awal pelaksanaan program, Tim BUMDes akan melakukan rapat internal yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan kemudian berlanjut pada rapat besar dengan melibatkan institusi Desa. Pada pelaksanaan di lapangan yang menjadi penentu dan ujung tombak dari keberhasilan persuasif adalah peran dari TIM itu sendiri. Hampir setiap bulan tim mengadakan rapat-rapat kecil dan komunikasi personal dengan warga yang difasilitasi baik langsung oleh perangkat desa (RT, RW, DUKUH) maupun oleh tim itu sendiri.

Pada tahapan selanjutnya, merupakan sebuah penegasan yang bersifat informatif, edukatif dengan

membuat berita-berita yang disebarakan melalui majalah desa dan media online desa tentang keberhasilan program yang dilaksanakan dan faedah-faedah yang bisa dirasakan secara langsung. Sungguhpun demikian, melalui media online ataupun majalah belum bisa dikatakan efektif, mengingat masih banyak adanya warga yang Gaptেক dan belum bisa memnfaatkan tegnologi. Sehingga langkah yang paling mungkin efektif dilakukan adalah dengan turun langsung kewarga lewat pertemuan-pertemuan kecil melalui ruang-ruang sosial yang sudah ada dengan memaparkan semua hasil memuaskan yang sudah diperoleh.

Adapun beberapa unit usaha yang dibentuk dan sudah bisa dirasakan manfaatnya adalah KUPAS. Secara historis, BUMDes Panggung Lestari merupakan kelanjutan dari program KUPAS yang dalam prakteknya mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa yang menjadi salah satu sumber pembiayaan program Bapel JPS. Selain itu juga kontribusi yang dihasilkan dari program KUPAS adalah mampu menghadirkan penghasilan yang bisa membantu menaikkan pendapatan warga dan bisa memberikan kesempatan bekerja bagi beberapa warga Panggungharjo.

Selain KUPAS bidang perekonomian yang dikelola oleh BUMDes Panggungharjo adalah usaha Kampung Mataraman. Jenis usaha ini merupakan terobosan baru berupa penyediaan kampong kuliner dan penyediaan

jasa berupa peminjaman fasilitas pertemuan dan kegiatan yang mampu menghadirkan ruang-ruang ekonomi guna mendapatkan sumber penghasilan baru bagi Desa Panggungharjo dan khususnya bagi masyarakat. Hal ini terbukti sejak diresmikanya kampung mataraman selama setahun mampu menghasilkan penghasilan sebanyak 8 milyar untuk desa.

Adapun product-product yang dipasarkan di kampung Mataraman adalah produk lokal yang dihasilkan oleh warga Desa Panggungharjo, seperti makanan kuliner khas panggungharjo, oleh-oleh khas Panggungharjo, serta kerajinan-kerajinan seperti tas, aksesoris rumah tangga dan lainnya. Produk-produk tersebut merupakan hasil dari program pemberdayaan ketrampilan yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo terhadap warga Panggungharjo. Bisa dikatakan bahwa selain sebagai bentuk usaha baru, kampung mataraman juga merupakan wahana baru yang disediakan untuk memfasilitasi program-program usaha lain dari BUMDes. Adapun unit usaha tersebut adalah Swadesa. Unit usaha ini merupakan usaha dalam layanan jasa berupa penyediaan gerai khusus untuk memasarkan product local dari warga desa baik nerupa lurik, batik, Jumputan, makanan maupun minuman olahan tradisional kerajinan dan dolanan anak-anak tradisional.

Usaha lain dari BUMNDes adalah UCO, unit usaha ini merupakan pengolahan minyak goreng bekas menjadi

bahan bakar pengganti solar. Usaha ini menurut wahyudi solar sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu dan bekerjasama dengan PT. Investama Klaten. Sedangkan usaha kedua berupa PT. Sinergi Panggung Lestari, yaitu pengolahan minyak tamanu yang merupakan satu komoditas internasional dan secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetik.²⁶

PT. Sinergi Panggung Lestari merupakan satu-satunya produsen minyak tamanu yang ada di Indonesia, kemudian minyak tamanu dikirimkan ke pasar internasional melalui mitra kerja yang ada di Jawa Tengah. Rata-rata PT. Sinergi Panggung Lestari menghasilkan minyak tamanu sekitar 400-600 liter per bulannya. Dua unit usaha yang tergabung dalam PT. Sinergi Panggung Lestari tersebut dikerjasamakan dengan perusahaan inkubator yang ada di Singapura untuk ikut menciptakan ekosistem tepat dalam rangka pengembangan BUMDes. Selain perusahaan inkubator, PT. Sinergi Panggung Lestari juga merupakan hasil kerjasama dengan Koperasi Wanita “Dewi Kunthi” Desa Panggungharjo.

²⁶ Disampaikan oleh Wahyudi Anggoro H. dalam sambutan pada kegiatan “penandatanganan pakta integritas serta perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT” tanggal 12/9/2018 di Kampoeng Mataram Panggungharjo.

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA

Strategi komunikasi menurut Rogers adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer informasi yang berupa ide atau gagasan baru. Sedangkan menurut Middleton strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari elemen komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi secara optimal.

Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika dalam perumusan strategi salah maka akan berdampak krusial atau fatal. Konsep strategi komunikasi disini diletakan sebagai bagian pendukung dari perencanaan komunikasi yang telah dibuat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun untuk menggambarkan secara keseluruhan bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah desa Panggungharjo dalam menciptakan kemandirian desa bisa dilihat dari dua item yaitu pesan komunikasi dan media

komunikasi. Kedua item ini juga bisa dikatakan sebagai penopang perencanaan komunikasi yang telah dipaparkan di atas demi terlaksananya tujuan komunikasi yaitu terciptanya kepercayaan dan kapasitas sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa Panggunharjo.

A. Pesan Komunikasi

Pesan komunikasi merupakan elemen dari proses komunikasi yang dianggap penting. Tanpa adanya pesan yang strategis dan bagus akan berakibat pada tidak efektifnya perencanaan komunikasi yang sudah dibuat. Dalam konteks usaha mewujudkan kemandirian desa Panggunharjo dan didasarkan atas perencanaan dari tujuan yang ingin dicapai, pesan-pesan komunikasi dibuat sedemikian rupa dengan menitikberatkan pada upaya-upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan dan eksistensi aparatur desa guna mencapai kapasitas sosial berupa partisipasi aktif dari masyarakat dalam usaha mewujudkan kemandirian desa.

Dalam konteks ini, pesan-pesan komunikasi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang nantinya mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas karakteristik yang dipunyai. Adapun sudut pandang yang dipakai dalam hal ini adalah pertama dilihat dari sifat-sifat pesan yang didasarkan pada pendekatan komunikasi yang digunakan dan yang kedua dilihat dari nilai-nilai yang

terkandung dalam pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya yang khususnya membahas tentang penentuan khalayak dan pendekatan komunikasi. Secara garis besar pendekatan komunikasi yang digunakan adalah menggunakan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Walaupun dalam prakteknya menghadirkan nuansa interaksi yang bersifat formal maupun nonformal. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara mendalam satu persatu berdasarkan pendekatan komunikasi yang ada di bawah ini.

1. Komunikasi Langsung

Secara garis besar dalam konteks komunikasi langsung kecenderungan yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dalam bentuk formal dengan memanfaatkan instrument-instrumen struktural berupa pertemuan rutin-an yang diselenggarakan oleh perangkat desa maupun stake holder desa Panggungharjo. Sungguhpun demikian, dalam proses komunikasi yang dilakukan masih bersifat formalitas. Dengan kata lain efektifitas proses komunikasi belum sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi formal ini, salah satunya adalah minimnya kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh perangkat desa. Hal ini mengharuskan peran aktif dari kepala desa untuk berperan sebagai komunikator tunggal dalam mengirimkan pesan kepada masyarakat (*One man show*) baik melalui rapat-rapat

maupun perbincangan melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan stake holder desa Panggungharjo.²⁷

Dalam proses visioning atas program-program dalam usaha mewujudkan kemandirian desa, selain peran sentral dari kepala Desa juga yang menjadi perhatian lebih dalam keseluruhan proses komunikasi langsung adalah peran serta dari pengurus lembaga-lembaga desa yang secara wewenang mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan program-program yang direncanakan. Keberadaan pengurus-pengurus ini menjadi penentu dari proses pendidikan terhadap warga atas program kerja yang dilaksanakan. Dengan berkerjasama dengan perangkat desa para pengurus tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dengan mengedepankan nilai partisipatif dan transparan. Sehingga dalam konteks ini peranan strategis perangkat desa dianggap tidak maksimal tanpa ada peran serta dari pengurus-pengurus lembaga tersebut.

Proses komunikasi langsung selain dilakukan dalam bentuk formal juga dilakukan dalam bentuk nonformal. Biasanya bentuk komunikasi dilakukan dengan komunikasi antar personal, komunikasi persusif lewat ruang-ruang sosial yang sudah menjadi budaya masyarakat, misalnya perbincangan dalam pertemuan RT, perbincangan dalam

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi, staf pemerintahan desa Panggungharjo tanggal 17 september 2018 pukul 14.00 di balai desa Panggungharjo.

kegiatan keagamaan dan ronda serta ruang-ruang sosial lainnya. Dalam proses komunikasi nonformal kebanyakan pesan yang dihadirkan bersifat informatif, edukatif yang mensyaratkan pada internalisasi nilai partisipatif dan transparansi sebagai landasan untuk menjalankan misi pembangunan desa.

Secara keseluruhan isi pesan yang disampaikan masih bersifat informatif, edukatif, instruktif yaitu berupa penjelasan tentang deskripsi program-program yang akan dilaksanakan yang menjadi prioritas pembangunan. Pesan informatif berupa penjelasan program kerja dan kegiatan yang sudah atau akan dilakukan. Biasanya pesan-pesan ini bisa ditemukan dalam perbincangan, diskusi maupun materi pembahasan rapat yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan baik dari tingkat RT, padukuhan maupun kelurahan. Secara mendalam penyampaian pesan informatif dilakukan dengan memaparkan secara mendetail tentang deskripsi program dari proses pembuatan dan penentuan mekanisme pelaksanaan melalui musyawarah bersama yang melibatkan partisipasi yang aktif dari warga hingga pada evaluasi atas output yang diharapkan. Sehingga kesan atau nuansa yang kita dapatkan dalam proses komunikasi yang berlangsung bernuansa kekeluargaan, partisipatif, transparan dan demokratis.

Pesan edukatif dalam komunikasi langsung ini bisa bersifat verbal maupun non verbal. Dalam bentuk verbal

biasanya dilakukan dalam pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat ataupun kegiatan lain berupa workshop dan pelatihan. Pesan edukatif ini memang dirancang dalam upaya pembangunan sumber daya manusia warga Panggungharjo untuk lebih kreatif dan produktif dalam menghasilkan produk local yang bisa dipasarkan. Diantaranya adalah pesan edukatif dalam rangka untuk menumbuhkan ketrampilan dalam pengelolaan sampah. Pesan edukatif yang disampaikan dalam ranah penjelasan program kerja dari proses visioning hingga sampai hal teknis yang harus dilaksanakan yang kesemuanya dalam pengamatan peneliti selalu menghadirkan nilai-nilai transparansi, demokratis, partisipatif dalam proses komunikasinya.

Pada pesan yang bersifat instruktif banyak ditemui dalam format komunikasi yang bersifat formal. Biasanya bersifat administrative yang berhubungan dengan evaluasi dan laporan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada tim atau struktur dibawahnya yang berhubungan dengan bidang program kerja yang dikerjakan. Sungguhpun demikian, pesan instruktif yang dimaksud dalam pembahasan ini berupa himbuan, masukan serta masukan atas beberapa kekeliruan yang berkaitan dengan administrative kelembagaan sebagai standart yang harus dijalankan untuk pelaksanaan program kerja yang telah atau akan dilaksanakan. adapun bentuk himbuan atau petunjuk banyak ditemui dalam bentuk verbal yang biasanya menjadi pembahasan tersendiri dalam materi

diskusi, rapat maupun musyawarah desa. Dalam bentuk lain bisa juga ditemui dalam bentuk tulisan berupa surat, memo ataupun pesan lewat media sosial. Dari keseluruhan proses komunikasi formal yang pesanya bersifat informatif seringkali dilakukan dengan jaringan komunikasi *top down* maupun *bottom up* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat komunikasi dilakukan. Walaupun seperti itu, ada beberapa hal yang menjadikan proses komunikasi terlihat sama dan tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan karena bauran budaya yang berasal dari internalisasi nilai-nilai oleh setiap individu yang menjadi peserta komunikasi, sehingga berdampak pada terciptanya iklim kekeluargaan, kebersamaan, transparansi dan demokratis.

2. Komunikasi Tidak Langsung

Secara garis besar komunikasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media massa baik berupa media online maupun media cetak. Pemanfaatan media online digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkait program kerja yang sudah dilaksanakan dan informasi-informasi penting terkait dengan referensi dan pengetahuan umum yang berhubungan dengan usaha untuk mewujudkan kemandirian desa. Dalam konteks ini pesan yang selalu dihadirkan bersifat edukatif dan persuasif. Dengan kemasan dalam narasi pemberitaan pesan tersebut dikemas dengan bingkai yang menarik sehingga pembaca bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang program kerja

yang dilaksanakan baik dari latar belakang, proses yang telah dijalankan hingga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam program tersebut. Selain itu dalam konteks pesan edukatif juga selalu menghadirkan bentuk narasi berita berupa pengetahuan tentang regulasi serta inovasi baru yang biasanya berasal dari pusat maupun daerah-daerah lain dalam usahanya mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri.

Selain terkait tentang program kerja, pesan-pesan yang dibuat untuk dikomunikasikan kepada warga baik melalui media online maupun media cetak berupa pesan informatif yang syarat akan transparansi dan edukasi terkait permasalahan pelayanan baik administratif maupun lainnya. dalam hal ini support aktif yang menjalankan adalah Pusat System Informasi Desa (PSID) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan berupa support kepada lembaga-lembaga desa berupa informasi program-program yang dijelankanya. Selain itu tugas pokok PSID adalah juga memberikan pelayanan-pelayanan lain yang sudah diatur berdasarkan tim atau defisi yang dibentuk didalam PSID. Adapun rincian tugas pokok tim-tim tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Tim	Tugas Pokok
1	Tim IT	<p>Tugas pokok tim IT ini adalah difokuskan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis website/online untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - System informasi pembangunan desa berbasis data spasial - System informasi pelayanan desa - Web desa (www.panggungharjo.desa.id) - Website transparansi anggaran pembelanjaan dan biaya desa/open APBDes (under constructing) - Sistem kearsipan Desa/ E-filling (under constructing)
2	Tim Media	<p>Tugas pokok Tim Media adalah menyediakan kebutuhan lembaga lain seperti website dan fanspage lembaga desa/ lembaga kemasyarakatan desa. Beberapa fanspage facebook yang telah dibuat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanggar Anak Desa Panggungharjo - Karang taruna cahyaning Amerta - BUMDes Panggung Lestari - Bumi Panggung - Bapel JPS - Resigana <p>Yang kesemuanya dikelola oleh masing-masing lembaga desa/ lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan dan dikontributori oleh Tim PSID baik dalam artikel maupun dokumentasi kegiatan</p>

Selain media online, media cetak juga dijadikan sebagai media komunikasi tidak langsung dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dalam upaya mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Perwujudan tersebut dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan

yang bersifat informatif dan edukatif dengan menekankan pada terciptanya nuansa partisipatif, demokratis dan keterbukaan. Hampir sama dengan media online, pesan-pesan yang disampaikan dikemas dalam narasi pemberitaan dalam sebuah Koran mingguan yang diberi nama “Koran Desa”. Menurut Wahyudi Anggoro Hadi tujuan Koran Desa dibuat selain sebagai media komunikasi tidak langsung, pada esensinya Koran ini hadir sebagai sarana interaksi dan ruang komunikasi berbagai unsur masyarakat pedesaan untuk saling memahami dan berbagi pengalaman antar warga serta antara satu desa dengan desa lain. Sehingga diharapkan dengan keberadaan media komunikasi ini mampu menjadi salah satu media untuk berbagi upaya memajukan kehidupan masyarakat desa dari berbagai aspek. Yang pada akhirnya bersama-sama turut mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Bukan itu saja, hampir sama dengan media online informasi tentang transparansi juga disajikan dalam bentuk penyampaian program-program kerja berdasarkan budget anggaran desa tahunan dari hasil musyawarah besar desa. Selain itu juga, berbagai system dan mekanisme pelayanan, baik itu pelayanan administrasi maupun pelayanan jasa agar bisa dilihat dan dijadikan referensi untuk warga dalam mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh desa.

3. Media Komunikasi

Sebagai indikator dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh prangkat desa dalam mewujudkan perencanaan komunikasi demi mewujudkan kemandirian desa, pilihan strategi yang dilakukan adalah dengan memilih media yang efektif dalam melakukan proses komunikasi. Adapun media komunikasi yang dipilih didasarkan pada tujuan utama dari pembangunan kemandirian desa dan didasarkan pada segmentasi atau sasaran khalayak yang dituju. Dari hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti yang sudah diutarakan dalam pembahasan dari beberapa item diatas, media komunikasi yang digunakan didasarkan pada bentuk komunikasi yang dipilih dan segmentasi khalayak yang menjadi sasaran komunikasi.

Adapun secara garis besar media komunikasi yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yaitu media konvensional (pemanfaatan ruang-ruang sosial sebagai media komunikasi) dan media massa. Seperti yang diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, media konvensional adalah pemanfaatan ruang-ruang sosial baik yang bersifat formal maupun informal, baik yang lama sudah ada dan menjadi budaya maupun yang baru sebagai rutinitas pemerintahan desa. Penggunaan media konvensional didasarkan pada bentuk komunikasi yang digunakan untuk membangun kepercayaan warga dengan mengirimkan pesan yang mengandung nilai-

nilai untuk menciptakan kepercayaan warga terhadap keberadaan pemerintahan desa baik bentuk komunikasinya bersifat antar personal, kelompok maupun public. Selain itu penggunaan media konvensional masih dianggap efektif mengingat faktor culture dan demografis dari karakteristik masyarakat Panggunharjo yang rata-rata akses informasi tentang kegiatan-kegiatan atau program kerja serta rencana pembangunan desa yang mereka dapatkan bersumber dari opinion leader sehingga atas alasan inilah media konvensional dianggap masih efektif untuk menjangkau semua kalangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja atau anak muda. Sungguhpun demikian, dinamika yang dialami dilapangkan untuk keberhasilan komunikasi masih bergantung pada kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh perangkat desa. Dengan keterbatasan yang ada maka upaya kepala desa adalah dengan memilih person yang mempunyai kompetensi komunikasi yang maksimal untuk dijadikan tim dari masing-masing program. Selanjutnya dari tim tersebutlah yang melakukan sosialisasi ke warga dengan difasilitasi oleh perangkat desa lewat pertemuan-pertemuan warga.

Media komunikasi selanjutnya yang digunakan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa adalah dengan memanfaatkan media massa. Seperti yang telah diulas pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk pemanfaatan media massa baik online maupun cetak dilakukan oleh tim desa

yaitu PSID. Pada substansinya tugas dan kewenangan PSID adalah mensupport kinerja dari tim-tim baik dari tim yang bertugas untuk bidang ekonomi, bidang sosial maupun bidang lainnya. Support yang diberikan adalah dengan memberikan informasi terkait program-program yang telah dilakukan dalam bentuk pemberitaan. Pada pemberitaan lebih menekankan pada edukasi kebergunaan program yang dilakukan dengan menyertakan transparansi berupa laporan-laporan program. Adapun laporan-laporan yang dimaksudkan adalah berupa deskripsi dari capaian ataupun output yang dihasilkan dari program tersebut bagi desa dan warga pada khususnya.

Selain itu bentuk transparansi juga disajikan dalam fasilitas pelayanan berupa aplikasi untuk mensupport tercapainya pelayanan yang maksimal dari pelayanan jasa dan sosial bagi warga serta fasilitas aduan untuk menampung kritikan, aduan ataupun aspirasi lain yang bersifat tidak langsung sebagai referensi data dalam melakukan evaluasi dan acuan perencanaan pembangunan kedepannya. Pemanfaatan media massa selain untuk media komunikasi kedalam juga digunakan sebagai media komunikasi untuk stroke holder lain selain warga atau masyarakat desa Panggungharjo. Hal ini ditekankan oleh Wahyudi Anggoro Hadi yang menganggap bahwa komunikasi keluar itu sangat penting dan harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan referensi baru bagi seluruh desa agar

terus berinovasi dalam mewujudkan kemandirian desa. Selain itu tujuan yang tidak kalah penting adalah untuk membranding desa panggungharjo sebagai desa yang berdaya dan mandiri. Setelah itu terjadi, diharapkan dari efek branding tersebut akan berakibat pada kepercayaan diri masyarakat desa Panggungharjo sehingga akan berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif dari seluruh warga desa Panggungharjo sebagai wujud dari kecintaanya yang merupakan efek dari kepercayaan diri tersebut. Sungguhpun demikian, langkah ini tidaklah menjadi harapan yang utama. Mengingat tipografi masyarakat kita semuanya dalam kesehariannya tidak mengakses teknologi atau masih gaptek. Atas alasan inilah maka proses komunikasi efektif yang bisa dimaksimalkan adalah dengan media konvensional yang masih mengandalkan opinion leader sebagai motor dalam melakukan perubahan.

BAB V

KOMUNIKASI EFEKTIF PERANGKAT DESA PANGGUNGHARJO

Pada subpembahasan ini akan lebih menekankan pada deskripsi proses komunikasi efektif yang telah dilakukan dengan menitik beratkan pada perencanaan dan strategi komunikasi yang dilakukan dalam mewujudkan kemandirian desa Panggungharjo. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan unsur-unsur komunikasi tersebut. Adapun untuk menggambarkan proses komunikasi efektif aparatur desa Panggungharjo bisa dilihat hasil pemetaan berdasarkan pada indikator perencanaan dan strategi komunikasi yang sudah dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa Panggungharjo. Adapun gambaran umum tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

A. Tujuan Komunikasi

1. Analisis Permasalahan

Landasan analisis permasalahan atas hambatan-hambatan yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam

mewujudkan kemandirian desa di Desa panggungharjo tersebut dilandaskan atas pemahaman kepala desa terhadap beberapa indikator yang harus maksimal dan terkoneksi dalam pelaksanaannya. Indikator-indikator tersebut bagi kepala Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mengukur kemampuannya untuk mengelola aset sebagaimana amanat dari undang-undang desa. Adapun indikator-indikator tersebut adalah kapasitas sosial (sumber daya yang dimiliki oleh warga desa), kapasitas politik dan kepemimpinan (sumber daya yang dimiliki oleh Kepala Desa), kapasitas proses dan birokrasi (sumber daya yang dimiliki oleh aparatur desa). Dari ketiga indikator tersebut yang menjadi kunci atas terwujudnya kemandirian desa adalah terletak pada kapasitas sosial yang dimiliki oleh warga desa. Sungguhpun demikian besarnya kapasitas sosial ini tidak serta merta bisa didorong menjadi modal sosial karena dalam perwujudannya mensyaratkan adanya kepercayaan.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa ini muncul dari presepsi masyarakat yang terbentuk puluhan tahun dengan system yang tidak memberikan ruang kebebasan dan kedaulatan bagi desa untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimilikinya. Dari alasan ini munculah sebuah presepsi umum yang difahami oleh seluruh masyarakat bahwa tugas dan kewenangan pemerintah desa selama ini adalah hanya pada sektor administrasi publik.

Selain kepercayaan, syarat berikutnya yang harus dilakukan untuk mendorong kapasitas sosial untuk menjadi modal sosial adalah kapabilitas. Dalam varian ini, dibagi menjadi tiga aspek yaitu; kapabilitas sosial, kapabelitas ekonomi dan kapabelitas politik. Dari ketiga aspek ini, aspek yang menjadi kunci untuk menunjang efektifitas aspek lainnya adalah terletak pada aspek sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan kapabilitas sosial adalah hilangnya ruang-ruang sosial sebagai wadah untuk mendiskusikan solusi dalam menyelesaikan masalah bersama berubah menjadi ruang-ruang sosial yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat pragmatis.

2. Penentuan Tujuan dan Sasaran Komunikasi

Pada aspek kemandirian desa seperti yang dijelaskan pada konsep pemikiran dalam penelitian ini, kemandirian desa bisa dilihat melalui tiga aspek yaitu: kekuatan sosial yang kondusif, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi. Bisa difahami, jika dikaitkan dengan landasan pemikiran yang menjadi dasar permasalahan untuk membuat perencanaan komunikasi, ketiga konsep ini bisa kita temukan pada salah satu indikator penentu kemampuan Desa dalam mengelola aset yang menjadi landasan Kepala desa dalam menganalisis permasalahan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan Desa. Adapun indikator tersebut adalah kapasitas sosial yang meliputi,

kapabilitas sosial, kapabilitas ekonomi dan kapabilitas politik yang dianggap sebagai kunci dalam menciptakan kemandirian desa.

Dari pemaparan di atas dan didasarkan pada analisis permasalahan yang sudah dilakukan, ada beberapa asumsi yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan tujuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa yang berorientasi kepada terciptanya kemandirian desa. Asumsi pertama, mewujudkan kemandirian desa merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu cukup panjang karena berhubungan dengan penciptaan pemahaman kognitif dan pembangunan kesadaran masyarakat. Asumsi kedua, mewujudkan kapasitas sosial yang kemudian didorong menjadi modal sosial. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kepercayaan dan kapabilitas.

Atas dasar asumsi tersebut maka tujuan atau target yang hendak dicapai dalam periode awal adalah bagaimana menciptakan kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah sebuah hubungan harmonis antara sumber daya masyarakat dengan sumber daya aparatur desa, hubungan harmonis antara sumber daya warga dengan pemimpin desa. Dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan mekanisme atau aturan yang telah ditetapkan sebagai acuan setiap kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Dapat juga dengan bahasa yang

sederhana dipahami bahwa iklim kepercayaan yang ingin diciptakan merupakan langkah awal yang menjadi jembatan bagi terciptanya kapabilitas secara umum.

3. Penentuan Khalayak dan Pendekatan Komunikasi yang Digunakan

a. Program Pembangunan Fisik

Pada prinsipnya setiap program yang dilaksanakan adalah berprioritas pada terciptanya kapabilitas sosial, kapabilitas ekonomi dan kapabilitas politik yang merupakan ukuran bagi terwujudnya kemandirian desa. pada program pembangunan fisik, khalayak yang menjadi sasaran utama adalah seluruh masyarakat desa panggungharjo dengan menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang terbentuknya ikatan sosial yang kondusif, berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat dan pada prosesnya selalu melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam perencanaan pembangunan fisik.

Dengan heterogenitas masyarakat yang sangat kompleks pendekatan komunikasi yang sering dilakukan adalah dengan mengutamakan pada terciptanya komunikasi yang interaktif dan partisipatif baik bersifat formal maupun nonformal dalam ruang-ruang sosial yang ada. Keberadaan komunikasi satu arah baik lewat media massa ataupun media sosial digunakan sebagai pelengkap untuk pengulangan

atau menegaskan pesan yang sudah diterima oleh khalayak lewat komunikasi dua arah yang sudah dilaksanakan. Walaupun khalayak dalam konteks komunikasi satu arah tidak bersifat masif yaitu hanya diterima oleh masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan opinion leader yang bertugas menyampaikan pesan tersebut pada masyarakat.

b. Program Pembangunan Nonfisik

Sama halnya dengan program pembangunan fisik, orientasi program pembangunan non fisik sasaran adalah terciptanya indikator kemandirian desa yang kondusif. Pada prinsipnya sasaran program pembangunan non fisik berorientasi pada output yang bisa memberikan manfaat pada keberlanjutan hidup warganya. Sehingga diharapkan akan menciptakan kepercayaan warga terhadap aparatur desa yang berdampak pada terwujudnya modal sosial berupa partisipasi aktif dari masyarakat. Penentuan program pembangunan didasarkan pada problem-problem yang dihadapi dan telah menjadi masalah sosial serta didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa. Sehingga hasil yang didapatkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan pelayanan desa yang tidak berorientasi hanya pada pelayanan administratif, peningkatan kondusifitas kehidupan sosial dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Penentuan khalayak pada pelaksanaan program pembangunan ini didasarkan pada segmentasi program yang telah dibuat. Sungguhpun demikian pada pelaksanaannya melibatkan semua stakeholder yang ada yang berasal dari beberapa lapisan masyarakat. Adapun dalam penentuan pendekatan komunikasi dilatarbelakangi oleh hambatan-hambatan komunikasi yang dimiliki. Hambatan komunikasi yang masih menjadi permasalahan adalah buruknya kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh aparatur desa sehingga dalam pelaksanaannya bergantung pada tim pelaksana program tersebut.

Pada prinsipnya proses komunikasi yang dilakukan selalu berorientasi pada terciptanya iklim yang demokratis, partisipatif dan kekeluargaan. Sehingga pendekatan komunikasi selalu menekankan pada komunikasi yang bersifat persuasif, informatif dan edukatif dengan bentuk komunikasi dua arah, baik dilakukan dalam komunikasi antar personal, komunikasi kelompok maupun public dengan desain forum yang bermacam-macam. Pendekatan komunikasi satu arah lebih menekankan pada paparan pelaksanaan program dalam bentuk narasi pemberitaan.

4. Pesan Komunikasi

Secara umum desain pesan komunikasi yang telah dibuat dilandaskan pada tujuan komunikasi yang telah ada, yaitu mewujudkan kemandirian desa dengan prioritas

pada terciptanya kepercayaan masyarakat yang akan berdampak pada terciptanya kapasitas sosial. Perwujudan tujuan tersebut direpresentasikan dalam pesan yang bersifat persuasif, informatif dan edukatif yang disampaikan berbeda-beda tergantung pada bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam pesan komunikasi yang dibuat selalu menghadirkan nilai-nilai yang menjadi landasan untuk terwujudnya kepercayaan masyarakat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pesan komunikasi tersebut adalah transparansi, demokratis dan partisipatif.

5. Media Komunikasi

Sebagai indikator dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh prangkat desa dalam mewujudkan perencanaan komunikasi demi mewujudkan kemandirian desa, pilihan strategi yang dilakukan adalah dengan memilih media yang efektif dalam melakukan proses komunikasi. Adapun media komunikasi yang dipilih didasarkan pada tujuan utama dari pembangunan kemandirian desa dan didasarkan pada segmentasi atau sasaran khalayak yang dituju.

Adapun secara garis besar media komunikasi yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yaitu media konvensional (pemanfaatan ruang-ruang sosial sebagai media komunikasi) dan media massa. Penggunaan media konvensional masih dianggap efektif mengingat

faktor culture dan demografis dari karakteristik masyarakat Panggungharjo yang rata-rata akses informasi tentang kegiatan-kegiatan atau program kerja serta rencana pembangunan desa yang mereka dapatkan bersumber dari *opinion leader* sehingga atas alasan inilah media konvensional dianggap masih efektif untuk menjangkau semua kalangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja atau anak muda.

Media komunikasi selanjutnya yang digunakan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa adalah dengan memanfaatkan media massa. Pemanfaatan media massa baik online maupun cetak dilakukan oleh tim desa yaitu PSID. Pada substansinya tugas dan kewenangan PSID adalah mendukung kinerja dari tim-tim baik dari tim yang bertugas untuk bidang ekonomi, bidang sosial maupun bidang lainnya. Suport yang diberikan adalah dengan memberikan informasi terkait program-program yang telah dilakukan dalam bentuk pemberitaan. Pada pemberitaan lebih menekankan pada edukasi kebergunaan program yang dilakukan dengan menyertakan transparansi berupa laporan-laporan program dan deskripsi partisipasi masyarakat. Adapun laporan-laporan yang dimaksudkan adalah berupa deskripsi dari capaian ataupun output yang dihasilkan dari program tersebut bagi desa dan warga pada khususnya.

Secara garis besar proses komunikasi efektif yang dilakukan oleh perangkat desa Panggungharjo yang

didasarkan pada indikator perencanaan dan strategi komunikasi bisa di lihat seperti yang diuraikan pada tabel elemen komunikasi diatas. Pada dasarnya gambaran tersebut bisa diuraikan lagi dengan menggunakan beberapa unsur komunikasi Menurut Lasswell yaitu, “*Who Says What In Which Chanel To Whom With What Effect*”. Berdasarkan definisi Lasswell tersebut ada lima komponen komunikasi yang saling bergantung satu sama lain yang bisa dijadikan ukuran untuk menggambarkan bagaimana komunikasi efektif yang dilakukan oleh perangkat desa Panggungharjo. Adapun kelima unsur tersebut adalah komunikator (perangkat desa beserta stake holder yang menjadi subyek utama dalam proses komunikasi efektif dalam membangun kemandirian desa Panggungharjo), Pesan, media, komunikan (warga desa Panggungharjo) dan efek.

Keberhasilan komunikasi tergantung pada kredibilitas dan kompetensi komunikatornya. Dalam konteks komunikasi efektif perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa komunikator sentral yang merupakan motor penggerak untuk melakukan perubahan adalah masih terletak pada sosok leader yaitu kepala desa. Dimana inisiasi dan ide utama dalam merumuskan visi dan misi pembangunan desa berasal dari visi internal kepala desa yang dalam prosesnya mengalami tantangan baik dari internal perangkat desa maupun warga Desa Panggungharjo.

Di awal gagasan pembangunan tersebut didengungkan, banyak tantangan sebagai reaksi atas gagasan tersebut. Salah satunya adalah kultur pemerintah desa yang tidak sesuai dengan visi kepala desa, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dalam melakukan visioning terhadap persepsi mereka. Paling tidak berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah dibuat yaitu membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa demi terwujudnya kapasitas sosial yang kondusif, langkah awal yang dilakukan adalah berupaya untuk menata ulang tata kelola pemerintahan desa Panggunharjo melalui reformasi birokrasi menjadi prioritas pembangunan.

Upaya untuk meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara mengembangkan pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik sehingga mencakup juga pelayanan atas barang dan jasa publik. Hal ini dilandaskan atas pemahaman bahwa selama barang dan jasa menjadi kebutuhan publik wajib bagi negara untuk memberikan pelayanan, sehingga permasalahan sosial seperti anak putus sekolah, ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, sampah berserakan dan warga gagal membangun mekanisme atau tata cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut serta tiada bantuan dari piha swasta untuk membantu warga desa menyelesaikan permasalahan tersebut hukumnya wajib bagi pemerintah

untuk hadir dan menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan persoalan lain yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah bagian dari barang dan jasa publik yang menjadi domain dari pelayanan publik. Sehingga diharapkan antara pemerintah desa dan warga desa hubungannya tidak hanya lagi terbatas hubungan administratif saja, tetapi melingkupi atas segala hal yang menjadi kebutuhan dan permasalahan sosial yang ada di desa.

Mindset aparatur desa yang sejak lama yang menganggap bahwa pelayanan publik adalah sama dengan pelayanan administrasi publik saja tentunya gagap ketika muncul tuntutan baru untuk juga bisa menghadirkan pelayanan barang dan jasa publik. Dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama untuk berubah. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa sekaligus dalam rangka untuk membuka ruang partisipasi dan mendorong proses pelembagaan partisipasi. Oleh karena hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga desa guna membantu pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan pemerintah desa. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk dalam membantu pemerintah desa dalam menghadirkan pelayanan yang maksimal adalah Badan usaha milik desa (BUMDes) Panggung lestari yang merupakan lembaga pertama yang dibentuk untuk membantu

pemerintahan desa dalam menyelesaikan permasalahan sampah dan lingkungan hidup lainnya serta menciptakan kemandirian ekonomi dengan pemberdayaan sampah. Menyusul dalam bidang pelayanan sosial yaitu Badan Pelaksana jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS). Kemudian menyusul dalam bidang perwujudan kemandirian ekonomi dibentuk lembaga pengelola desa budaya bumi panggung. Dan lembaga-lembaga lain yang didirikan untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kemandirian sosial budaya dan politik yaitu: sanggar anak desa, Lembaga mediasi desa (LMD), Dewan masjid desa, dan beberapa lembaga desa lainnya.

Secara substantif pesan dalam proses komunikasi efektif aparatur desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa adalah merupakan tujuan dan visi dari program pembangunan yang telah dicanangkan. Lebih sederhana bisa dijelaskan bahwa pesan utama dalam proses komunikasi tersebut adalah bagaimana membangun kepercayaan warga atas keberadaan perangkat atau aparatur desa. Kemudian dari kepercayaan tersebut diterjemahkan dalam ranah yang implementatif berupa karakteristik pesan yang bersifat persuasif, edukatif dan informatif.

Karakteristik pesan akan mengalami polarisasi tergantung pada pendekatan komunikasi yang dilakukan. Akan tetapi pada beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan pesan-pesan komunikasi yang dikirimkan selalu

mengandung nilai-nilai yang mungkin dalam prespektif peneliti bahwa nilai-nilai tersebut merupakan pondasi utama dalam mewujudkan kepercayaan yang telah menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah akuntabilitas, transparansi dan demokratis.

Dalam upaya membangun akuntabilitas, pesan-pesan yang dikirim berupa informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Misalnya adalah bermitra dengan BPKP dalam rangka untuk melakukan kaji ulang atas dokumen RPJMDes sekaligus dalam rangka untuk menyusun mekanisme pengendalian internal. Selain itu juga adalah langkah membangun kemitraan dengan Kantor Arsip Daerah guna membantu pemerintah desa dalam membangun system arsip desa. hal ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan dokumentasi dan arsip merupakan salah satu kunci dalam upaya membangun akuntabilitas.

Upaya membangun transparansi dilakukan dengan cara mendistribusikan pesan yang bersifat informatif sampai pad tingkatan warga dengan menggunakan berbagai platform yang dikembangkan melalui system informasi desa. Berbeda dengan desa-desa lain, dalam pengelolaan informasi desa ini dikelola oleh sebuah lembaga desa dimana yang bertindak selaku pengurus adalah warga desa sendiri. Hal ini dilakukan selain dalam rangka membangun partisipasi adalah juga sekaligus untuk menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak bias kepentingan elit desa.

Selanjutnya media yang digunakan dalam upaya mendistribusikan pesan-pesan pembangunan tersebut adalah dengan memanfaatkan media konvensional berupa pemanfaatan ruang-ruang sosial yang sudah ada atau baru dibentuk. Pemanfaatan ruang-ruang sosial tersebut selain sebagai penciptaan keakraban juga dilakukan dalam ranah untuk memberikan akses pada lembaga desa yang anggotanya merupakan warga desa untuk mensosialisasikan program-program yang dilakukan dan membangun partisipasi aktif warga. Selain media konvensional, seperti yang diutarakan diatas bahwa dalam penyampaian pesanya juga memanfaatkan media massa berupa media online dan media cetak yang pengelolaanya di lakukan oleh pusat system informasi desa yang sudah dilembagakan.

Dari beberapa ulasan yang ada pada proses komunikasi efektif yang dilakukan oleh aparatur desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa yang menjadi sasaran komunikasi atau komunikan dalam proses komunikasi adalah semua elemen masyarakat desa Panggungharjo. Adapun dalam kontek ini peran aparatur desa juga bisa dikatakan sebagai komunikan dengan alasan dari sisi historis penyusunan perencanaan dan strategi komunikasi yang menjadi komunikator tunggal adalah kepala desa. Mengingat dari alasan penetapan tujuan komunikasi adalah membangun kepercayaan warga terhadap keberadaan aparatur desa, dimana dalam konteks ini

dari upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah membangun pemahaman yang salah dari aparatur desa yang menganggap bahwa pelayanan publik sama dengan pelayanan administrasi.

www.samudrabiru.co.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi efektif perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa dilandaskan atas tujuan utama pembangunan desa yaitu menciptakan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Pendekatan yang dilakukan dalam mewujudkan kepercayaan warga dilakukan dengan membangun kembali kondisi sosial yang kondusif, menciptakan partisipasi politik yang masif dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa dengan menciptakan iklim yang akuntabel, transparan dan demokratis melalui pesan-pesan yang informatif, edukatif dan persuasif atas program-program strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga desa.

Pada proses komunikasi yang dilakukan, komunikasi efektif perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa masih bergantung pada keberadaan

sosok pemimpin. Dimana dalam konteks ini, kepala desa merupakan sosok tunggal yang menjadi komunikator dalam proses komunikasi. Keberadaan aparatur desa dan pengurus lembaga desa pada awalnya adalah bagian dari komunikan dalam proses komunikasi. Akan tetapi pada prosesnya setelah mendapatkan visioning dari kepala desa keberadaan mereka dalam proses komunikasi berubah menjadi bagian dari komunikator pada proses komunikasi perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa.

Selanjutnya dalam proses komunikasi efektif, media komunikasi yang digunakan lebih menekankan pada penggunaan media konvensional. Hal ini didasarkan pada pendekatan komunikasi yang digunakan yaitu lebih menekankan pada komunikasi langsung. Peran penggunaan media online ataupun cetak digunakan sebagai pelengkap penegasan dan pengingat atas pesan yang sudah dikirimkan lewat media konvensional.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penjabaran teori-teori komunikasi yang bersinggungan dengan perencanaan dan strategi komunikasi pembangunan terbukti dilakukan. Dalam hal ini komunikasi efektif yang dilakukan oleh Pamong Desa Panggungharjo didasarkan pada target komunikasi yaitu menghadirkan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan pemerintah desa. Pada prosesnya

komunikasi efektif yang dilakukan masih bergantung pada keberadaan figure kepemimpinan, dimana kepala Desa masih memosisikan dirinya sebagai komunikator yang otonom.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini telah memperlihatkan bagaimana perencanaan dan strategi komunikasi dibuat dan direalisasikan walaupun dalam prakteknya terkendala oleh minimnya SDM khususnya aparatur desa dan pamong desa yang masih menganggap peranan pemerintah Desa hanya pada pelayanan administrasi publik, sehingga dalam upaya membangun kemandirian desa diperlukan bangunan kelembagaan sabagai media partisipasi warga yang dapat difungsikan untuk membantu pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya secara benar.

www.samudrabilu.co.id

DAFTAR PUSTAKA

- Anyaegbunam, Chike.dkk. Particapatory Rural Communication Appraisal Starting with The People. Rome: SADC Centre of Communication for Development,2004.
- Effendy, Onong Uchjana, Hubungan Masyarakat; study komunikologis, Rosda karya, Bandung, 1991.
- Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi: teori dan Praktek, Remaja, Rosdakarya, Bnadung, 2000.
- Eko, Sutoro , makalah berjudul “regulasi baru desa”, di publukasikan pada Bimbingan Teknis DPRD Jombang di Balai Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Regional DIY, tanggal 17 Februari 2014.
- Eko, Sutoro, bersama Kawan-kawan, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.
- Gamble, Teri Kwal dan Michael Gamble. Communication Works .New York: McGraw-Hill.2005.

- Jumrana, model-model desain komunikasi pembangunan, Jurnal Arca Diurna Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Haluoleo, vol.08 no. 02, 2012.
- Kurniawan, Borni, , Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Moleong , J. Lexy. Metode penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosad Karya Bandung ,2001.
- Mulyana,Dedy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Sisvianda, Devina Kristie. strategi komunikasi pendamping PNPM-MPD dalam upaya pemberian pemahaman program kepada masyarakat (Studi pada Kegiatan SPP di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa- Kabupaten Jember), Jurusan Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Suryaningtyas, Annis Azhar, strategi komunikasi partisipatif pada awal program pembangunan (Studi Kasus Pendekatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Kepada Masyarakat dalam Program Pembangunan Underpass di Makamhaji), Program studi ilmu komunikasi dan informatika universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Widuri, Diah dan Patje Saubaki. Partisipasi Warga Dalam Penanggulangan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Stock Take: Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE Yogyakarta Bekerjasama dengan ACCESS Tahap II,2012.

www.Kemendagri.go.id. Mendagri anugrahi penghargaan desa/kelurahan terbaik 2014, pada tanggal 18 Agustus 2014, di upload pada tanggal 19 November 2015.

www.samudrabiru.co.id

www.samudrabiru.co.id

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA

Nanang Mizwar Hasyim S.Sos, M.Si

Strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer informasi yang berupa ide atau gagasan baru (**Rogers**)

Pada proses komunikasi yang dilakukan, komunikasi efektif perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa masih bergantung pada keberadaan sosok pemimpin. Dimana dalam konteks ini, kepala desa merupakan sosok tunggal yang menjadi komunikator dalam proses komunikasi. Keberadaan aparatur desa dan pengurus lembaga desa pada awalnya adalah bagian dari komunikan dalam proses komunikasi. Akan tetapi pada prosesnya setelah mendapatkan *visioning* dari kepala desa keberadaan mereka dalam proses komunikasi berubah menjadi bagian dari komunikator pada proses komunikasi perangkat desa Panggungharjo dalam mewujudkan kemandirian desa.



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-306-5



9 786232 613065